

**LAPORAN PENELITIAN
HIBAH BERSAING TAHUN KE I**



JUDUL

**KAJIAN KERAGAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT PESISIR DI KOTA BENGKULU**

Disusun Oleh :

M. ZULKARNAIN YULIARSO, SP, M.Si
INDRA CAHYADINATA, SP, M.Si
Ir. BASUKI SIGIT PRIYONO, M.Sc

DIBIYAI OLEH DIPA UNIB NO. 024.0/023-04.2/VIII/2009
BERDASARKAN SURAT KONTRAK
NOMOR 2803/H30.10.06.01/HK/2009 TANGGAL 01 APRIL 2009

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BENGKULU
NOVEMBER 2009**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

1. Judul : KAJIAN KERAGAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
PESISIR DI KOTA BENGKULU

2. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : M. ZULKARNAIN YULIARSO, SP.M, Si
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. NIP/Golongan : 132 288 171 / III c
d. Srata/Jab. Fungsional : S 2 / LEKTOR
e. Jabatan Struktural : KETUA LAB SOSEK
f. Bidang Ilmu : PENYULUHAN PEMBANGUNAN
g. Fakultas/Jurusan : PERTANIAN / SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
h. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS BENGKULU

i. Tim Peneliti

No	Nama	Bidang Keahlian	Jurusan	Perguruan Tinggi
1	Indra Cahyadinata, SP, M.Si	Pengelolaan Sumberdaya Pesisir	Sosial Ekonomi Pertanian	UNIB
2	Basuki Sigit Priyono, Ir, M.Sc	Community Dev	Sosial Ekonomi Pertanian	UNIB

3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian

a. Jangka Waktu Penelitian : 2 Tahun
b. Biaya Total yang diusulkan : Rp 85,231,000,-
c. Biaya yang disetujui Tahun 2009 (I) : Rp 41,500,000,-

Mengetahui,
Kepala Fakultas

Dr. I. YUWANA, M.Sc
NIP. 19591210 198603 1 003

Bengkulu, 10 Nopember 2009
Ketua Peneliti,

M. ZULKARNAIN YULIARSO, SP,M, Si
NIP. 132 288 171

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

Drs. SARWIT SARWONO, M.Hum
NIP. 131 601 662

RINGKASAN

KAJIAN KERAGAAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP) DI KOTA BENGKULU (M. Zulkarnain. Y, Indra Cahyadinata, Basuki Sigit Priyono)

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengkaji keragaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat Pesisir (PEMP), 2) Menganalisis dampak program terhadap pendapatan masyarakat pesisir di Kota Bengkulu. 3) Mengkaji manfaat yang diperoleh masyarakat. Penelitian ini didisain sebagai penelitian deskriptif dengan studi kasus, dengan lokasi daerah pesisir Kota Bengkulu dalam wilayah kerja Koperasi LEPP-M3 Bina Masyarakat Pesisir. Pengumpulan data dilakukan sepanjang Bulan Agustus-September 2009. Responden ditentukan secara sensus dari anggota Koperasi yang aktif, sebanyak 102 orang. Tujuan pertama dianalisis dengan menggunakan analisa deskriptif terhadap tiga kategori implementasi yaitu *input* (masukan), *process* (pelaksanaan) dan *output* (keluaran) yang disajikan dalam bentuk persentase, tujuan kedua dianalisis dengan analisa pendapatan dan regresi linier berganda, sedangkan tujuan ketiga dianalisis dengan analisa deskriptif.

Hasil menunjukan bahwa Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) secara keseluruhan belum mencapai hasil yang optimal sesuai harapan dan tujuan dari pelaksanaan program. Rata-rata pendapatan sebesar Rp 2.009.901,-/bulan naik sekitar 39.22 % dari sebelumnya. Secara parsial, faktor yang mempengaruhi pendapatan masyarakat adalah jumlah anggota keluarga dan besarnya

modal usaha. Manfaat dari program PEMP yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat adalah bantuan pinjaman dana dengan bunga yang sangat rendah.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi program PEMP adalah : 1) Perlu pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program secara menyeluruh, dan yang menekankan pada output dan dampak dari program. 2) Perlu dirumuskan prioritas-prioritas program yang dapat dilaksanakan sebagai penyempurnaan dari program PEMP yang telah disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat

(Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu)

DAFTAR ISI

RINGKASAN DAN SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	20
3.1. Penentuan Lokasi	20
3.2. Manfaat Penelitian	20
BAB IV. METODE PENELITIAN	24
4.1. Disain Penelitian	24
4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
4.3. Penentuan Responden	24
4.4. Pengumpulan Data dan Analisis Data	25
4.5. Definisi dan Pengukuran Variabel	30
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	32
5.1. Karakteristik Responden	32
5.2. Keragaan Program PEMP	45
5.3. Analisis Tingkat Pengembalian	48
5.4 Analisis Pendapatan	54
5.5 Manfaat Program	62
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	64
6.1. Kesimpulan	64
6.2. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68

BAB I. PENDAHULUAN

Propinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah pesisir yang secara geografis terletak antara $2^{\circ}16'$ – $3^{\circ}31'$ Lintang Selatan (LS) dan $101^{\circ}01'$ – $103^{\circ}41'$ Bujur Timur (BT). Propinsi Bengkulu yang berada di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan memiliki luas wilayah sekitar 1.978.870 hektar atau $19.788,7 \text{ km}^2$ dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 433 kilometer. Propinsi Bengkulu terbagi atas 3 (tiga) daerah kabupaten (Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Rejang Lebong) dan 1 (satu) daerah kota, yaitu Kota Bengkulu yang sekaligus sebagai ibukota propinsi. (Bengkulu dalam Angka, 2002).

Secara nominal, Kota Bengkulu sebagai ibukota propinsi dan satu-satunya daerah kota di Propinsi Bengkulu memiliki luas wilayah yang paling kecil dan jumlah penduduk yang paling sedikit di bandingkan dengan tiga daerah kabupaten yang ada. Namun, kondisi tersebut pula yang menyebabkan tingginya kepadatan penduduk di Kota Bengkulu, yaitu 2.105 jiwa per km^2 . Dari jumlah tersebut, 69,21% diantaranya bekerja pada sektor pertanian. Mengingat seluruh wilayah di Kota Bengkulu merupakan daerah pesisir dengan ketinggian di atas permukaan laut antara 0 – 20 meter (Bengkulu dalam Angka, 2002), di duga ada sekitar 80% dari masyarakat pesisir Kota Bengkulu yang bekerja di sektor pertanian bekerja di bidang perikanan dan kelautan.

Secara umum, pembangunan perikanan dan kelautan pada masa lalu kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah sehingga permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat perikanan dan kelautan seolah-olah diwarisi secara turun-temurun dari

generasi sebelumnya. Salah satu indikasi kurangnya perhatian pemerintah adalah kecilnya jumlah alokasi kredit perbankan yang teralokasikan untuk usaha perikanan dan kelautan (hanya 0,02% dari total kredit) selama Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I hingga pertengahan PJP II (Dahuri, 2004). Sehingga sangatlah wajar apabila masyarakat pesisir sering diidentikkan sebagai masyarakat miskin, terbelakang dan termarjinalkan.

Terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) pada tahun 1999, membawa harapan baru dalam memecahkan permasalahan masyarakat pesisir di Indonesia, khususnya Kota Bengkulu. Salah satu program yang dilaksanakan oleh DKP adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan (DKP, 2003). Kota Bengkulu menjadi salah satu daerah sasaran PEMP yang dimulai sejak tahun 2002 sampai saat ini.

Program PEMP telah diimplementasikan secara nasional, sehingga diasumsikan proses 1 – 5 telah dilakukan dan dianggap bahwa PEMP adalah salah satu alternatif keputusan terbaik yang dipilih untuk diimplementasikan. Keberhasilan PEMP sebagai salah satu keputusan yang dilaksanakan DKP adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir, atau setidaknya meminimalkan permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir.

Program PEMP yang dilaksanakan di Kota Bengkulu pada tahun anggaran 2002 dan 2003 diharapkan telah menunjukkan hasil yang positif sesuai dengan tujuannya.

Untuk itu, maka perlu dilakukan evaluasi dan kajian terhadap program tersebut. Data dan informasi yang diperoleh dari evaluasi dan kajian tersebut sangat penting artinya dalam merumuskan kembali alternatif-alternatif program yang dapat di ambil untuk meningkatkan kesejahteraan dan memecahkan permasalahan masyarakat pesisir

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep dan Isu Strategis Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara daratan dan laut, dimana batas darat meliputi daerah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut dan batas laut meliputi daerah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan (Bengen, 2002). Ini berarti, sumberdaya wilayah pesisir terdiri dari sumberdaya yang ada di laut dan di darat yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang hidup di daerah pesisir (masyarakat pesisir).

Secara administratif, batas wilayah pesisir kearah laut dapat diukur dari garis pantai kearah laut sejauh 4 mil untuk daerah kabupaten/kota dan 12 mil untuk daerah propinsi. Batas wilayah pesisir kearah darat dapat diukur dari batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbitrer, seperti 2 km, 20 km, dan seterusnya dari garis pantai (Djais, 2004).

Wilayah pesisir merupakan *multipl- use zone*, dimana banyak kepentingan dengan berbagai macam perilaku. Pemanfaatan kawasan pesisir antara lain untuk kelautan, perikanan, industri, pertambangan, pemukiman, perhubungan dan lain-lain. Sebagai dampak dari pemanfaatan, maka isu-isu negatif muncul pada wilayah pesisir seperti :

1. Degradasi biofisik lingkungan pesisir (mangrove, terumbu karang, stok ikan, erosi pantai, pencemaran, dan sedimentasi)

2. Konflik pemanfaatan dan kewenangan di wilayah pesisir sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan.
3. Ketidakpastian hukum, karena adanya ambiguitas pemilikan dan penguasaan sumberdaya pesisir.
4. Marginalisasi dan kemiskinan serta pertumbuhan penduduk yg tinggi di pesisir.

2.2. Gambaran Umum Tentang PEMP

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pemberdayaan masyarakat mendapatkan perhatian yang sangat besar yang dituangkan dalam bentuk kebijakan nasional. Melalui program kompensasi pengurangan subsidi BBM, diluncurkan bantuan dana ekonomi produktif untuk beberapa bidang yang dikelola oleh departemen terkait. Pada Departemen Kelautan dan Perikanan, salah satu bentuk program kompensasi melalui peluncuran dana ekonomi produktif dikemas dalam bentuk program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang di mulai sejak tahun 2000.

Secara umum, PEMP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan (DKP, 2003). Sedangkan secara khusus, PEMP bertujuan untuk :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawsan dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang didampingi dengan

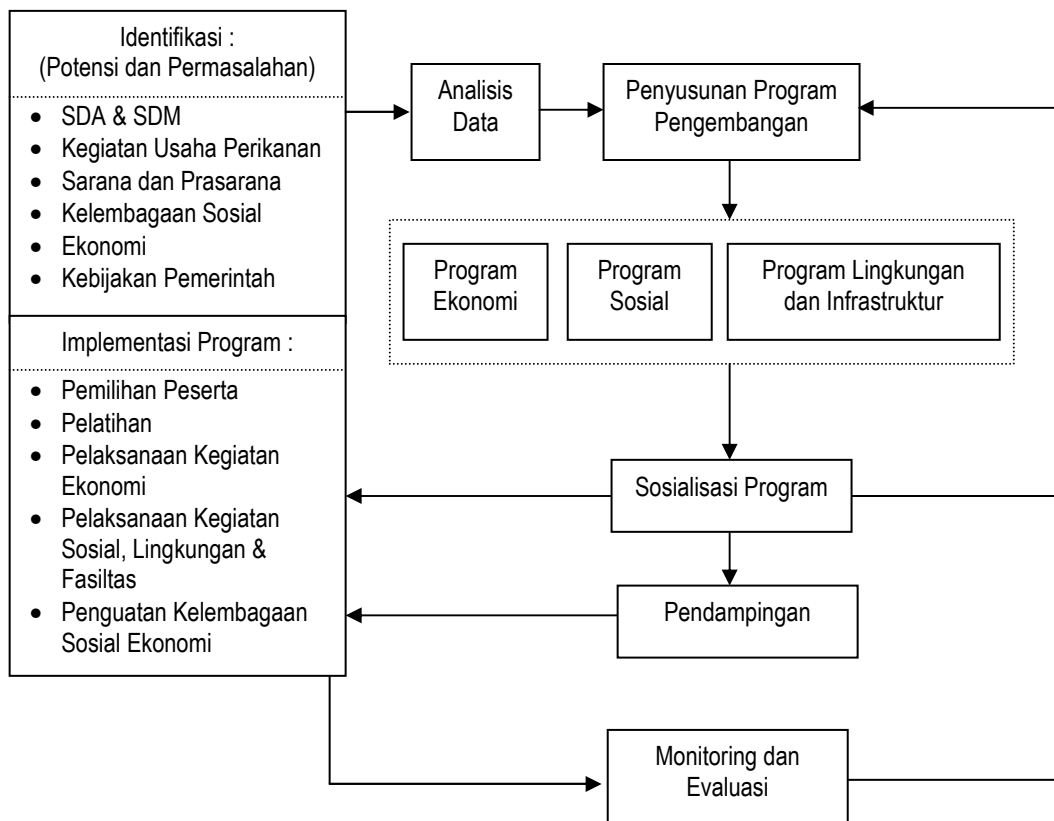
pengembangan kegiatan sosial, pelestarian lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk mendorong kemandirian masyarakat pesisir.

2. Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir yang terkait dengan sumberdaya perikanan dan kelautan.
3. Mengelola dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan.
4. Memperkuat kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dan kemitraan dalam mendukung perkembangan wilayahnya.
5. Mendorong terwujudnya mekanisme manajemen pembangunan yang partisipatif dan transparan dalam kegiatan masyarakat.

Sasaran PEMP adalah masyarakat pesisir yang memiliki mata pencaharian atau berusaha dengan memanfaatkan potensi pesisir seperti nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, pengolah ikan dan usaha jasa/kegiatan yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan, yang kurang berdaya dalam peningkatan/penguatan usahanya. PEMP bukan bersifat hadiah, melainkan pemberdayaan sehingga diharapkan dapat terus berkembang dan menyentuh sebagian besar masyarakat pesisir yang menjalankan jenis usaha yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut serta usaha lain yang terkait. Program ini menggunakan model pengembangan usaha yang bersifat perguliran/revolving yang dilakukan setelah ada keuntungan dan usaha kelompok telah kuat. Pinjaman modal melalui dana ekonomi produktif masyarakat yang diterima oleh

sasaran wajib untuk dikembalikan agar terjadi perguliran kepada masyarakat pesisir lainnya yang membutuhkan serta terpilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

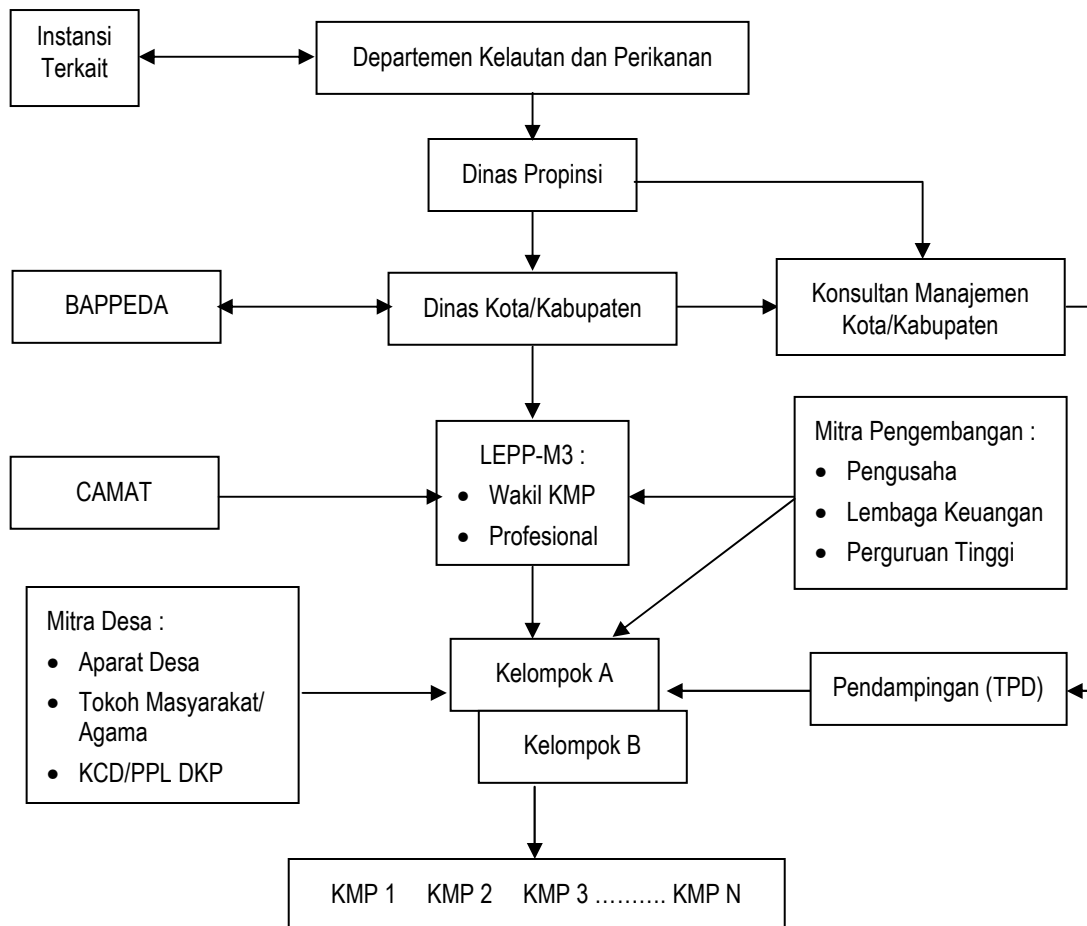
Model pengembangan PEMP adalah :



Gambar 1. Model Pengembangan PEMP

(Sumber : Pedoman Umum PEMP 2003, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir DKP)

Sedangkan struktur kelembagaan PEMP adalah :



Gambar 2. Struktur Kelembagaan PEMP

(Sumber : Pedoman Umum PEMP 2003, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir DKP)

Penelitian tentang PEMP telah dilakukan oleh Khasanaturodhiyah (2002) di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan – Jawa Tengah. Pada penelitian ini, digunakan istilah KUB (kelompok usaha bersama) untuk kelompok pemanfaat dana ekonomi produktif program PEMP, sedangkan pada struktur kelembagaan PEMP kelompok tersebut dikenal dengan istilah KMP (kelompok masyarakat pemanfaat), maka dalam penulisan hasil penelitian digunakan istilah KMP.

Beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program PEMP di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Khasanaturodhiyah, 2002), yaitu :

1. Mundurnya pelaksanaan sosialisasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
2. Data dari desa-desa yang tersedia kurang lengkap maka perlu adanya pengumpulan data dari berbagai sumber.
3. Pandangan masyarakat yang terbentuk sekarang ini menganggap bahwa bantuan dari pemerintah merupakan sebuah bantuan cuma-cuma dan tidak perlu dikembalikan.
4. Terlambatnya pembentukan KMP mengakibatkan pelaksanaan pelatihan untuk semua KMP mundur dari waktu yang ditentukan.
5. Kurangnya pengetahuan KMP tentang pemilihan kapal, modifikasi teknologi kapal dan pentingnya *cool box* (kotak pendingin).
6. Pada saat pelatihan, kemampuan KMP dalam menguasai materi relatif lambat dikarenakan tingkat pendidikan rata-rata rendah.

Pada penelitian ini juga diukur tingkat partisipasi peserta program PEMP dengan indikator yang digunakan adalah (1) kemauan masyarakat untuk ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa waktu maupun tenaga dalam melaksanakan program PEMP, (2) hak masyarakat untuk ikut menentukan arah dan tujuan program yang dilaksanakan di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, dan (3) kemauan masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan hasil program (Khasanaturodhiyah, 2002).

Tingkat partisipasi KMP Pedagang terhadap PEMP di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan – Jawa Tengah yang tergolong partisipasi tinggi sebanyak 57,1%, partisipasi sedang sebanyak 28,5% dan partisipasi rendah sebanyak 14,2% (jumlah

responden 28 orang). Faktor-faktor yang secara nyata mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut adalah jumlah tanggungan keluarga, status penduduk, pendidikan dan kondisi rumah. Sedangkan pada KMP Nelayan, 43,7% berpartisipasi tinggi, 37,5% berpartisipasi sedang dan 18,7% berpartisipasi rendah (jumlah responden 16 orang). Faktor-faktor yang secara nyata mempengaruhi tingkat partisipasi ini adalah status penduduk, pendidikan, pendapatan dan kondisi rumah (Khasanaturodhiyah, 2002).

Bantuan PEMP yang diberikan belum mampu memberikan surplus produksi yang dapat digunakan untuk akumulasi modal bagi proses perdagangan dan pengolahan ikan dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 70,3% responden menyatakan bahwa omset per hari mereka tetap. Pengembalian pinjaman juga tidak lancar (ada pinjaman yang macet) karena adanya pedagang yang mendapat musibah (anggota keluarga sakit).

Sutomo (2003) menyatakan pelaksanaan program PEMP tahun anggaran 2001 di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah belum mencapai hasil yang optimal. Hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja pelaksana PEMP diperoleh : Bupati = 63%, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan = 60%, Pimbagpro = 60%, Tenaga Pendamping Desa = 55%, KM Kabupaten = 65%, Mitra Desa = 46%, KMP = 79% dan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) = 20%. Hal ini disebabkan oleh pengelola program tidak memahami dengan baik konsep pemberdayaan masyarakat pesisir. Disamping itu, mereka yang pernah melakukan pelanggaran belum pernah mendapat tindakan nyata atas pelanggaran yang

mereka lakukan seperti pada program KUT sehingga aktor-aktor proyek di daerah semakin berani melakukan pelanggaran.

Hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja tahapan kegiatan diklasifikasikan menjadi 6 kategori, yaitu *input* (masukan), *process* (pelaksanaan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak). Indikator kinerja *input* yang digunakan adalah sumberdaya manusia, kelembagaan, sosialisasi, modal usaha yang diterima, pelatihan, tenaga pendamping desa (TPD) dan konsultan. Indikator *process* adalah pemilihan lokasi dan kelompok sasaran, penyaluran bantuan, penyusunan rencana kegiatan, pengawasan dan pelaporan. Indikator *output* adalah keragaan produksi, yaitu produksi primer dan sampingan. Indikator *outcome* adalah pendapatan dan perguliran dana ekonomi produktif. Indikator *benefit* adalah pendapatan agregat dan pemerataan inter wilayah dan indikator *impact* adalah dampak positif dan negatif program secara umum (Sutomo, 2003).

Penelitian ini menunjukkan pencapaian kinerja *input* = 48%, *process* = 59%, *output* = 16% serta *Outcome/benefit/Impact* = 0%. Hal ini disebabkan oleh kurang diperhatikannya dampak positif suatu proyek di daerah dan administrasi yang rapi masih lebih diutamakan daripada hasil dari suatu proyek. Ini berarti PEMP Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah hanya berjalan hanya pada tahap awal pelaksanaan dan kinerja program semakin buruk pada kegiatan selanjutnya. Beberapa faktor yang menyebabkan program ini tidak berjalan dengan baik adalah moralitas pelaksana, fasilitas yang diberikan tidak digunakan secara optimal dan modal sosial seperti kepercayaan dan solidaritas kurang dimiliki oleh KMP (Sutomo, 2003).

2.3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh dan kuat (Hikmat, 2001). Payne *dalam* Hikmat (2001) mendefinisikan pemberdayaan adalah sebuah pernyataan tentang kesanggupan pemenuhan kebutuhan diri sendiri. McArdle *dalam* Hikmat (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya bahkan merupakan suatu keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka.

Dari konsep pemberdayaan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan lestari sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Menurut Soesilowati *dalam* Latif (1999), ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat pesisir yaitu :

1. Strategi Fasilitasi, yaitu strategi yang mengharapkan kelompok yang menjadi sasaran suatu program sadar terhadap pilihan-pilihan dan sumberdaya yang dimiliki. Strategi

ini dikenal sebagai strategi kooperatif, yaitu agen perubah bersama-sama masyarakat mencari penyelesaian terhadap suatu masalah.

2. Strategi Edukatif, yaitu strategi yang memberikan pengetahuan dan keahlian pada masyarakat yang akan diberdayakan.
3. Strategi Persuasif, yaitu strategi yang berupaya membawa perubahan melalui kebiasaan dalam berperilaku. Strategi ini lebih cocok digunakan bila masyarakat tidak sadar terhadap kebutuhan perubahan atau mempunyai komitmen yang rendah terhadap perubahan.
4. Strategi kekuasaan, yaitu strategi yang membutuhkan agen perubah yang mempunyai sumber-sumber untuk memberi bonus atau sanksi pada target serta mempunyai akses untuk monopoli.

Inti dari empat strategi pemberdayaan di atas adalah memberikan cara pengelolaan terbaik yang harus dilakukan agar masyarakat pesisir mau dan mampu mengelola sumberdaya yang mereka miliki. Nikijulw (2002) menjelaskan tiga bentuk manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan dan lautan, yaitu pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat (PSPBM), pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah dan ko-manajemen (integrasi PSPBM dan pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah).

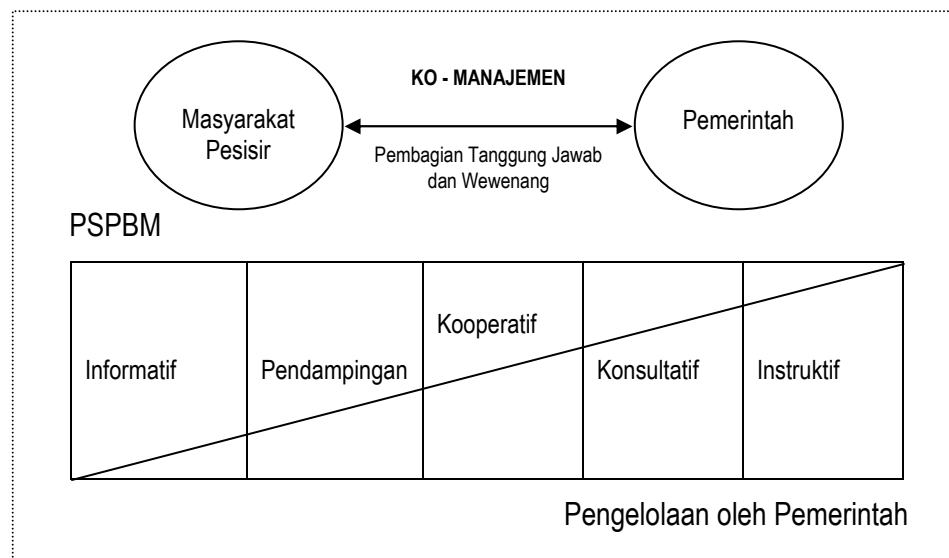
PSPBM dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya perikanan sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan keinginan, tujuan, aspirasi dan mengambil keputusan untuk menentukan dan berpengaruh pada

kesejahteraan hidup mereka. Beberapa keunggulan dari PSPBM adalah sesuai aspirasi dan budaya lokal, dapat diterima masyarakat lokal dan pengawasan dilakukan dengan mudah. Sedangkan kelemahan PSPBM adalah tidak mengatasi masalah interkomunitas, bersifat lokal, mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal, sulit mencapai skala ekonomi dan tingginya biaya institusionalisasi.

Pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah berarti semua tahapan dan pengelolaan sumberdaya perikanan mulai dari pengumpulan informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang kuasa dan wewenang dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan. Keunggulan pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah adalah dari sisi aspek legal, yang sangat didukung oleh aturan-aturan formal dan tertulis sehingga apabila setiap pihak dapat menjalankan dan mematuhi seluruh aturan dengan baik maka hasilnya akan baik pula. Menurut Lawson *dalam* Nikijuluw (2002), kelemahan pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah adalah kegagalan dalam mencegah kelebihan eksploitasi sumberdaya perikanan, kesulitan dalam penegakan hukum, kemampuan dan keberhasilan masyarakat untuk menghindari dari peraturan, kebijakan yang tidak tepat dan tidak jelas atau saling bertentangan, administrasi dalam bentuk biaya yang tinggi, wewenang yang terbagi-bagi kepada beberapa departemen atau lembaga, data dan informasi tidak (kurang) benar dan akurat serta kegagalan dalam merumuskan keputusan manajemen.

PSPBM dan pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah masing-masing memiliki keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan. Kedua bentuk pengelolaan

tersebut bisa dipadukan atau diintegrasikan sehingga kelemahan yang satu bisa ditutupi oleh keunggulan yang lain. Pengintegrasian kedua bentuk pengelolaan ini dikenal dengan nama kolaborasi manajemen, kooperatif manajemen atau ko-manajemen. Ko-manajemen menyiratkan bahwa kerjasama antara pemerintah dan masyarakat merupakan inti dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Ko-manajemen perikanan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3. Ko-Manajemen Perikanan (Nikijuluw, 2002)

Strategi dan manajemen pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan dapat dituangkan dalam bentuk program-program nyata, yang merupakan program unggulan, terencana dan komitmen yang kuat. Bentuk program nyata tersebut (PKSPL dan LIPI, 1998) adalah program peningkatan kesejahteraan nelayan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengetahuan IPTEK serta pengembangan industri perikanan dan kelautan.

Di Kecamatan Pulau-Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai – Sulawesi Selatan (Mustamin, 2003), pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan dilakukan dalam bentuk ko-manajemen. Dinas perikanan kabupaten menempatkan seorang petugas penyuluh lapang untuk mendampingi dan memonitor semua aktivitas nelayan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dengan melakukan pendekatan kelompok. Strategi dalam ko-manajemen tersebut adalah strategi persuasif, strategi edukatif dan strategi fasilitatif.

Strategi persuasif berupaya membawa perubahan melalui kebiasaan dalam berperilaku dengan melakukan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Strategi edukatif memberikan suatu pemahaman dan pengetahuan baru dalam mengadopsi suatu perubahan, dimana masyarakat dikonsultasi oleh pemerintah. Strategi fasilitatif berupaya membantu nelayan melalui kelompok untuk meningkatkan kegiatan usaha dan mobilitas kerja. Berdasarkan strategi dalam ko-manajemen tersebut, disusun beberapa program, yaitu program penyuluhan, program pelatihan dan pemberian fasilitas modal kerja.

Secara umum disimpulkan, ko-manajemen telah memberikan dampak positif terhadap nelayan berupa kesejahteraan yang lebih baik dengan tingkat kerusakan lingkungan yang menurun. Dari 30 orang responden, 56,67% dikategorikan memiliki tingkat kesejahteraan tinggi, 26,66% kategori sedang dan 16,66% dikategorikan memiliki kesejahteraan yang rendah (Mustamin, 2003).

Tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan menggunakan indikator pendapatan, pengeluaran, pendidikan, kesehatan, kondisi dan fasilitas perumahan. Tingkat kesejahteraan yang diukur adalah tingkat kesejahteraan masyarakat pada saat

penelitian dilakukan dan tidak membandingkan tingkat kesejahteraan sebelum dan setelah pelaksanaan program ko-manajemen

3.4. Kerangka Pemikiran Penelitian

Tahap pertama yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini adalah melihat keragaan dalam pelaksanaan PEMP di Kota Bengkulu. Keragaan yang dimaksud adalah bagaimana tahapan atau proses dalam implementasi program PEMP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasarannya, yang meliputi kajian *input* (masukan), *process* (pelaksanaan) dan *output* (keluaran). Selanjutnya juga akan dikaji sistem dan besarnya tingkat pengembalian dana ekonomi produktif yang telah digulirkan serta perguliran kembali pinjaman yang telah dikembalikan oleh kelompok masyarakat pemanfaat (KMP).

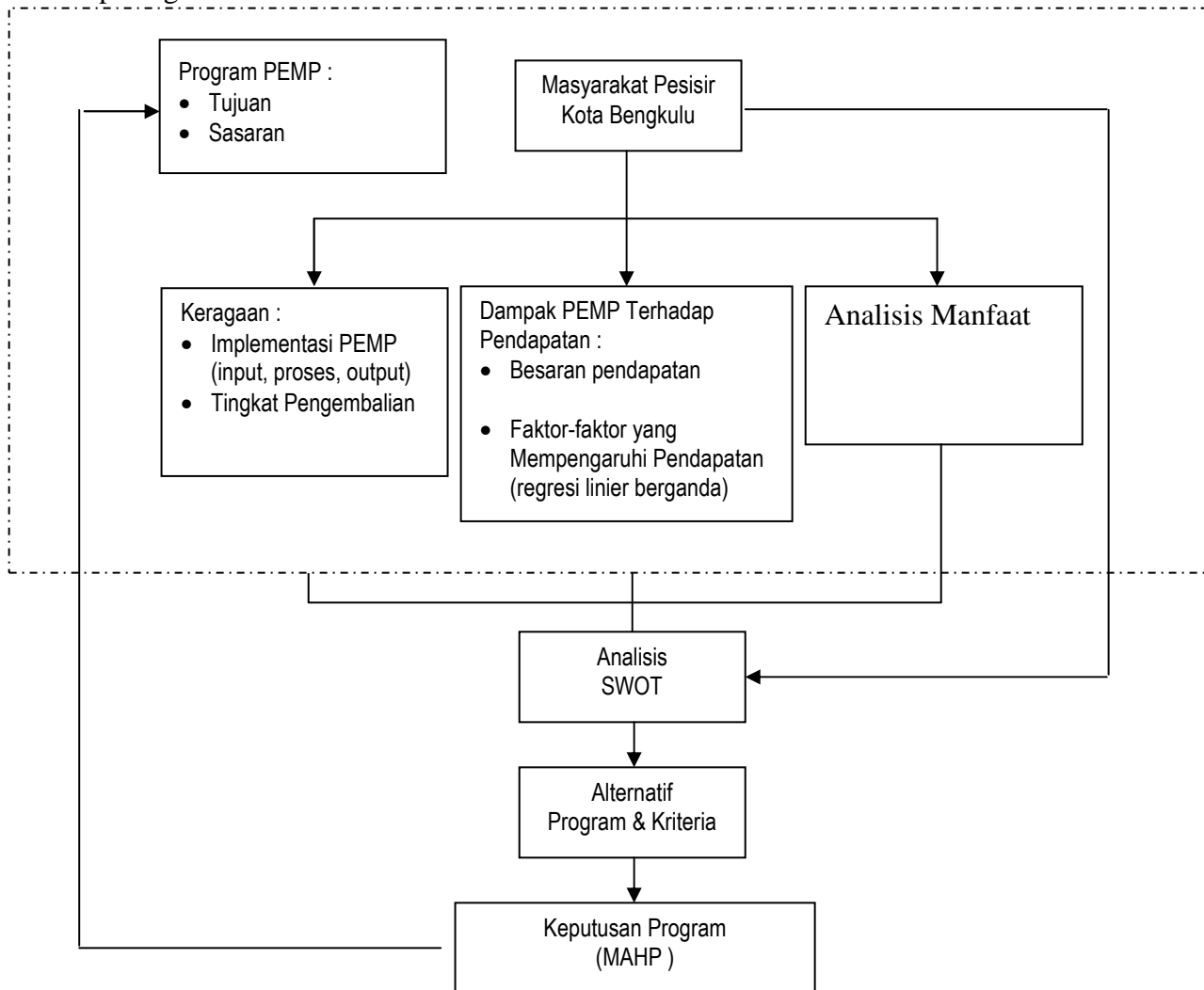
Setelah diketahui keragaan program PEMP di Kota Bengkulu, selanjutnya akan dikaji dampak PEMP terhadap pendapatan masyarakat yang telah menerima perguliran dana. Kajian pendapatan ini akan membahas peningkatan pendapatan kotor dan pendapatan bersih (pendapatan setelah dikurangi pengeluaran) anggota KMP serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan tersebut. Dengan menggunakan regresi linier berganda, akan diketahui besarnya pengaruh dana PEMP terhadap pendapatan masyarakat.

Dana ekonomi produktif PEMP yang digulirkan ke masyarakat (KMP) merupakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat pesisir dalam kurun waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian

terhadap manfaat yang diterima atau dirasakan masyarakat baik manfaat langsung ataupun tidak langsung.

Data dan informasi yang diperoleh dari kajian keragaan, dampak PEMP terhadap pendapatan dan analisis manfaat PEMP akan memberikan informasi tentang bagaimana sesungguhnya kondisi PEMP yang diimplementasikan di Kota Bengkulu. Informasi yang diperoleh tersebut akan dianalisis untuk mengetahui keunggulan, kelemahan, peluang dan ancaman masyarakat pesisir di Kota Bengkulu, khususnya dalam pelaksanaan program PEMP. Kajian keunggulan, kelemahan, peluang dan ancaman ini dilakukan secara komprehensif, yaitu kajian yang dihubungkan dengan kondisi masyarakat pesisir dan lautan di Kota Bengkulu. Kajian ini akan dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threaty*) pada tahapan penelitian selanjutnya berikutnya.

Secara diagramatik, kerangka pemikiran konseptual penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. Kerangka Pemikiran Konseptual Penelitian

Ket. Bagan dalam kotak terputus-putus adalah kerangka dalam penelitian yang sekarang dilakukan.

BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Mengkaji keragaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat Pesisir (PEMP),
- 2) Menganalisis dampak program terhadap pendapatan masyarakat pesisir di Kota Bengkulu, dan
- 3) Mengkaji manfaat yang diperoleh masyarakat.

3.2 Manfaat Penelitian

Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara daratan dan laut, dimana batas darat meliputi daerah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut dan batas laut meliputi daerah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan (Bengen, 2002). Ini berarti, sumberdaya wilayah pesisir terdiri dari sumberdaya yang ada di laut dan di darat yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang hidup di daerah pesisir (masyarakat pesisir).

Ekosistem pesisir dan laut merupakan suatu himpunan integral dari komponen hayati (organisme hidup) dan non-hayati (fisik), yang secara fungsional berhubungan dan saling berinteraksi membentuk suatu sistem yang di kenal dengan ekosistem atau sistem ekologi (Bengen, 2002). Sumberdaya hayati dan non-hayati dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada disekitarnya. Agar tetap lestari

dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan, maka sumberdaya tersebut perlu dikelola dengan baik melalui manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang baik pula.

Retting *dalam* Nikijuluw (2002) menyatakan bahwa pendekatan manajemen sumberdaya perikanan dapat diklasifikasikan menjadi lima pendekatan yaitu pembatasan jumlah ikan yang ditangkap, pendekatan tidak langsung dalam mengalokasikan kegiatan penangkapan ikan, perizinan yang terbatas, pendekatan yang bersifat moneter dan hak kepemilikan atas sumberdaya ikan dan alokasi jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Dari lima pendekatan manajemen sumberdaya perikanan, program PEMP merupakan salah satu pendekatan manajemen yang bersifat moneter yaitu berupa program dukungan finansial.

Program PEMP merupakan program yang dibuat secara nasional dan diimplementasikan di beberapa daerah di Indonesia secara serentak. Padahal, permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir antara satu wilayah dengan wilayah lain belum tentu sama. Masyarakat pesisir di suatu daerah memiliki kelebihan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan pada setiap daerah, sehingga dapat mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian tujuan PEMP. Oleh karena itu, untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal untuk kesejahteraan, setiap daerah membutuhkan pendekatan program yang berbeda pula.

Tujuan PEMP menyiratkan bahwa sesungguhnya PEMP bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Secara ilmiah,

pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan terdiri dari beberapa tahapan proses (Kusumastanto, 2000), yaitu (1) menentukan permasalahan, (2) identifikasi alternatif untuk memecahkan masalah, (3) menentukan kriteria keberhasilan terhadap alternatif pemecahan masalah, (4) mengevaluasi setiap alternatif yang ada, (5) memilih salah satu alternatif sebagai suatu keputusan, (6) mengimplementasikan keputusan dan (7) mengevaluasi hasil dari implementasi keputusan tersebut.

Pada sisi lain, masyarakat pesisir di Kota Bengkulu yang bekerja di bidang perikanan dan kelautan umumnya bermata pencaharian atau berusaha dengan memanfaatkan potensi pesisir seperti nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, pengolah ikan dan usaha jasa/kegiatan yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan. Ada 6 (enam) permasalahan mendasar yang dialami oleh masyarakat pesisir Kota Bengkulu yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan (Dasman, 2003), yaitu :

1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang mempengaruhi rendahnya kemampuan penggunaan teknologi untuk pengembangan usaha.
2. Rendahnya modal usaha untuk peningkatan kapasitas, diversifikasi dan kesinambungan usaha.
3. Sarana/prasarana yang ada belum memadai, misalnya pabrik es, docking kapal dan lain-lain.
4. Belum adanya investor yang berskala besar sebagai mitra usaha bagi para nelayan.
5. Domisili nelayan yang tersebar di sepanjang pantai, tidak terkonsentrasi dalam satu kawasan sentra produksi.

6. Kultur masyarakat pesisir yang plural menyebabkan sering munculnya konflik kepentingan dalam pemahaman maupun penerimaan terhadap program pemerintah.

Implementasi program PEMP diharapkan mampu memecahkan persoalan mendasar masyarakat pesisir di Kota Bengkulu. Pada tataran implementasi program, tentu ditemui banyak kendala mengingat program PEMP merupakan program nasional yang diimplementasikan pada tingkat lokal (daerah). Kajian tentang implementasi program PEMP akan menemukan penyesuaian strategi implementasi sesuai dengan kondisi masyarakat di Kota Bengkulu (berdasarkan kearifan lokal)

IV. METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Disain Penelitian

Penelitian ini didisain sebagai penelitian *deskriptif* dengan *studi kasus*. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki baik secara kuantitatif ataupun kualitatif (Nazir, 1999). Sedangkan studi kasus atau penelitian kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas (Maxfield *dalam* Nazir, 1999).

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di daerah pesisir Kota Bengkulu dalam wilayah kerja Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Masyarakat Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) Bina Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu. Pengambilan data lapangan dilakukan pada Bulan Agustus – September 2009.

4.3 Penentuan Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendapat bantuan pinjaman dana ekonomi produktif (DEP) dari Koperasi Bina Masyarakat Pesisir yang

secara aktif meminjam sepanjang tahun 2007 - 2009. Responden di tentukan secara sensus, sejumlah 102 orang.

4.4 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

4.4.1 Pengumpulan Data

Data dan Instrumentasi Data

Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, meliputi :

- 1) Data primer, Data primer akan diambil langsung di lapangan (masyarakat pesisir dan pihak terkait dengan PEMP di Kota Bengkulu, dan
- 2) Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- 1) wawancara, yaitu melalui wawancara langsung kepada responden dengan berpedoman pada kuisisioner yang sudah disiapkan.
- 2) pencatatan, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang tersedia pada instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan masalah penelitian.

Instrumentasi

Instrumentasi atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kuisisioner yang memuat daftar pertanyaan yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian

Uji Kesahihan (Validity test) : Alat ukur dikatakan sah apabila alat ukur itu dapat mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur. Pada penelitian ini, daftar pertanyaan disusun dengan cara (1) mempertimbangkan teori-teori dengan kenyataan yang telah diungkap dalam pustaka empirik, (2) menyesuaikan isi pertanyaan dengan kondisi responden, dan (3) memperhatikan masukan dari pakar. Korelasi product moment digunakan untuk menentukan tingkat validitas pertanyaan dalam kuisioner. Beberapa cara untuk menetapkan validitas alat ukur yang dipakai, yaitu (1) Validitas konstruktif, artinya penelitian menyusun tolak ukur operasional berdasarkan kerangka dari konsep yang akan diukur, (2) validitas isi, artinya isi alat ukur tersebut dapat mewakili semua aspek yang dianggap sebagai aspek kerangka konsep, (3) validitas eksternal artinya alat ukur baru yang akan digunakan tidak berbeda hasilnya jika dibandingkan dengan alat ukur yang lama dan yang sah (Ancok, 1989).

Jenis validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi, yaitu dengan cara menyesuaikan isi kuisioner dengan teori yang menyangkut semua jenis variabel penelitian. Disamping itu juga dengan mengadakan konsultasi secara intensif dengan para ahli dan berbagai pihak yang dianggap menguasai tentang materi daftar pertanyaan yang akan digunakan.

Uji Keterandalan (Reliability Test) : Menurut Sugiyono (2002) reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Suatu alat ukur mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya apabila alat ukur tersebut mantap reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Suatu alat ukur mempunyai

reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya apabila alat ukur tersebut konsisten. Suatu alat ukur yang konsisten tidak akan berubah-ubah pengukurannya dan dapat diandalkan karena penggunaan alat ukur ini akan memberikan hasil yang sama meskipun dipakai berkali-kali. Pengukuran dilakukan untuk mendapatkan alat ukur yang memiliki reliabilitas yang tinggi.

4.4.2 Metode Analisis Data

a. Analisis Keragaan PEMP

Keragaan yang dimaksud adalah tahapan atau proses dalam implementasi program PEMP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasarannya, yang meliputi kajian *input* (masukan), *process* (pelaksanaan) dan *output* (keluaran). Input adalah segala sesuatu yang menjadi masukan dalam implementasi program PEMP di Kota Bengkulu, yaitu sumberdaya manusia, kelembagaan, sosialisasi dan pelatihan. Proses adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah input menjadi output, yaitu pemilihan lokasi dan kelompok sasaran, penyusunan rencana kegiatan, penyaluran bantuan, pengawasan dan pelaporan. Output adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, yaitu keragaan produksi baik produksi utama maupun produksi sampingan.

Penilaian terhadap kinerja input, proses dan output disajikan dalam bentuk persentase, yang diolah dari penilaian dalam bentuk skoring yang diberikan oleh responden terhadap indikator input, proses dan output dalam penelitian ini.

b. Analisis Tingkat Pengembalian Pinjaman Dana Ekonomi Produktif

Pengukuran tingkat pengembalian dana yang telah digulirkan atau dipinjamkan, dihitung dari persentase perbandingan antara jumlah dana yang dikembalikan dengan jumlah dana ekonomi produktif yang diterima, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pengembalian} = \frac{\text{Total Pengembalian Dana}}{\text{Total Pinjaman}} \times 100 \%$$

c. Analisis Pendapatan

Dalam penelitian ini akan dibandingkan besarnya pendapatan responden sebelum dan setelah adanya PEMP. Pendapatan yang dihitung adalah pendapatan kotor dan pendapatan bersih (pendapatan kotor setelah dikurangi pengeluaran). Pendapatan tersebut dihitung dengan cara :

$$\begin{array}{llll} Y_{sb} & = & Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n & \text{dan} & Y_{st} & = & Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n \\ P_{sb} & = & P_1 + P_2 + \dots + P_i & \text{dan} & P_{st} & = & P_1 + P_2 + \dots + P_i \\ PB_{sb} & = & Y_{sb} - P_{sb} & \text{dan} & PB_{st} & = & Y_{st} - P_{st} \end{array}$$

$$\text{Persentase Peningkatan Pendapatan} = \frac{Y_{st} - Y_{sb}}{Y_{sb}} \times 100 \%$$

$$\text{Peningkatan Pendapatan Bersih} = \frac{PB_{st} - PB_{sb}}{PB_{sb}} \times 100 \%$$

Keterangan

Y	: Pendapatan (kotor)	st	: Setelah PEMP
P	: Pengeluaran	1 - n	: Sumber-sumber Pendapatan
PB	: Pendapatan Bersih	1 - i	: Pos-pos Pengeluaran
Sb	: Sebelum PEMP		

Setelah di hitung besarnya pendapatan sebelum dan setelah program PEMP, maka akan ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan tersebut. Faktor-faktor yang saat ini diduga mempengaruhi pendapatan adalah umur, jumlah anggota keluarga, pendidikan, jenis pekerjaan, pengalaman usaha, modal, dan besarnya pinjaman. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Faktor-faktor tersebut terhadap pendapatan dilakukan analisis regresi linier berganda yang diolah dengan Microsoft Excel. Secara matematis, bentuk regresi dari pendapatan adalah :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6$$

dimana :

- Y : Pendapatan
- X₁ : Umur (tahun)
- X₂ : Jumlah Anggota Keluarga (orang)
- X₃ : Pendidikan (tahun)
- X₄ : Jenis Pekerjaan (1=perikanan dan kelautan, 0 = Non perikanan dan kelautan)
- X₅ : Pengalaman Usaha (th)
- X₆ : Besarnya modal usaha (Rp)
- X₇ : Besarnya pinjaman yang diperoleh (Rp)

C. Analisis Manfaat

Analisis manfaat dilakukan dengan analisis deskriptif. Data-data kualitatif dianalisis dengan menggunakan teori Fenomenologis, artinya bahwa analisis data yang didapatkan dari memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tersebut. Dengan berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang diteliti sedemikian rupa sehingga

mengerti dan paham apa dan bagaimana suatu pandangan atau pendapat terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar mereka dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan masyarakat dapat menginterpretasikan pengalaman, pandangan, atau pendapat mereka melalui interaksi dengan orang lain. Dengan pendekatan ini, dapat diketahui perilaku utuh dari masyarakat terhadap fenomena yang diteliti

4.6 Batasan dan Pengukuran

Beberapa batasan dan pengukuran dalam penelitian ini adalah :

1. Input dalam implementasi PEMP adalah segala sesuatu yang menjadi masukan dalam implementasi PEMP, yaitu sumberdaya manusia, kelembagaan, sosialisasi dan pelatihan.
2. Proses dalam implementasi PEMP adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah input menjadi output, yaitu pemilihan lokasi dan kelompok sasaran, penyusunan rencana kegiatan, penyaluran bantuan, pengawasan dan pelaporan.
3. Output dalam implementasi PEMP adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, yaitu keragaan produksi baik produksi utama maupun produksi sampingan.
4. Pengembalian dana adalah jumlah total angsuran yang telah dibayarkan anggota Masyarakat pemanfaat ke Koperasi Bina Masyarakat Pesisir, dihitung dalam rupiah dan persentase.
5. Penerimaan adalah rata-rata total penerimaan keluarga dalam satu bulan, sebelum dan sesudah PEMP, diukur dalam rupiah.

6. Pendapatan adalah pendapatan rata-rata anggota KMP per bulan yang diperoleh dari kegiatan/usaha ekonomi produktif yang dilakukan, sebelum dan sesudah adanya PEMP, diukur dalam rupiah.
7. Pengeluaran keluarga adalah rata-rata total uang per bulan yang dikeluarkan oleh anggota KMP untuk membiayai semua kebutuhan hidup keluarga, baik sebelum ataupun sesudah adanya PEMP, diukur dalam rupiah.
8. Manfaat (*benefit*) adalah diseluruh manfaat yang dapat diterima oleh anggota Koperasi Bina Masyarakat baik manfaat langung/tidak langsung, maupun manfaat yang kelihatan/tidak kelihatan. Diuraikan secara deskriptif.
9. Jumlah anggota keluarga yang adalah jumlah orang dalam suatu keluarga, dihitung dalam satuan orang.
10. Besarnya modal adalah total modal yang digunakan anggota KMP untuk menjalankan usahanya, diukur dalam rupiah.
11. Pengalaman adalah pengalaman masyarakat pemanfaat di bidang usahanya masing-masing diukur dalam satuan tahun.
12. Pendidikan adalah pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh responden , dihitung dalam satuan tahun.
13. Jenis Pekerjaan adalah jenis pekerjaan yang dilakukan oleh responden, jika berkaitan dengan bidang perikanan dan kelautan diberi skor 1, dan jika tidak diberi nilai 0.

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden

Masyarakat di pesisir Kota Bengkulu mempunyai mata pencaharian yang beragam, sebagian besar mereka bekerja sebagai nelayan dan pedagang kecilan-kecilan, namun ada juga penduduk yang bermata pencaharian lain walaupun jumlahnya hanya sebagian kecil misalnya buruh, pegawai negeri, pekerja swasta dan lain-lain. Biasanya pekerjaan sebagai nelayan telah mereka lakukan bertahun-tahun, tingkat pendidikan umumnya rendah namun tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk terus meningkatkan keahliannya dalam bidang perikanan tangkap dan perdagangan.

Karakteristik masyarakat di pesisir Kota Bengkulu yang diteliti berdasarkan faktor sosial ekonomi meliputi umur, jumlah keluarga, pendidikan formal, jenis pekerjaan, tingkat kesejahteraan, pengalaman kerja, modal usaha, penerimaan usaha, penerimaan rumah tangga dan pengeluaran rumah tangga. Untuk lebih jelasnya karakteristik responden diuraikan seperti di bawah ini:

Umur

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat pesisir Kota Bengkulu menunjukkan bahwa rata-rata umur responden semuanya dalam kategori produktif, karena batasan umur produkti adalah antara 15-65 tahun. Individu yang berada dalam usia produktif, memungkinkan mereka untuk bekerja lebih baik, mempunyai semangat yang tinggi dalam bekerja. Keadaan ini dapat mendukung

pekerjaan di bidang yang ditekuninya, karena umumnya mereka masih mempunyai fisik yang kuat dan tenaga yang banyak, serta pikiran yang lebih terbuka dalam menerima sesuatu yang baru di bidang pekerjaannya masing-masing. Untuk lebih jelasnya karakteristik responden berdasarkan umur, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Umur Responden Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu

No	Kategori Umur (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Rata-rata	Range
1	Muda (26-37,3)	40	39,6	40,35	28-60
2	Sedang (37,4-48,7)	49	47,5		
3	Tua (48,8-60)	13	12,9		
	Total	102	100		

Dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa semua responden masih dalam rentang kategori umur produktif, dimana rata-rata umur 40,35 tahun. Sebagian besar responden (87,1%) berada pada usia kategori muda dan sedang (26 tahun-48,7tahun). Secara fisik individu ini masih sangat produktif, kuat dalam bekerja, dari segi wawasan individu yang demikian ini biasanya lebih terbuka dan selalu mencari sesuatu yang baru di bidang kehidupannya dan lebih berani dalam mengambil resiko untuk keadaan yang lebih baik dalam bidang yang ditekuninya. Misalnya jika dia seorang pedagang maka dia berani mengambil kredit dari bank untuk peningkatan modal usahanya.

Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan kepala keluarga atau dengan kata lain masih harus dipenuhi

kebutuhannya. Jumlah tanggungan keluarga dapat pula diartikan semua orang yang tinggal dalam suatu rumah baik yang sedang bepergian (misalnya sekolah) maupun yang tinggal serumah karena belum mandiri. Menurut Sinungun (1987), bahwa anggota keluarga yang menjadi tanggungan akan meningkatkan kemauan untuk bekerja lebih baik, disebabkan karena besarnya kebutuhan keluarga hanya akan dapat terpenuhi apabila seorang itu bekerja keras sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang dapat menunjang kebutuhan hidupnya. Dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga berarti akan memperbesar konsumsi atau pengeluaran seperti pangan, perumahan, pakaian serta meningkatnya kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Besarnya jumlah tanggungan keluarga ini pada akhirnya bisa mendorong kepala keluarga untuk bekerja keras dalam pekerjaan yang ditekuninya. Besarnya kebutuhan keluarga juga bisa memotivasi kepala keluarga untuk mencoba mengembangkan alternatif baru di bidang perdagangan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan keluarganya. Di lain pihak besarnya jumlah anggota keluarga juga mencerminkan ketersediaan sumberdaya manusia (*human resources*) sebagai tenaga kerja dalam keluarga. Hal ini berarti jumlah anggota keluarga, terutama yang telah dewasa mempunyai nilai ekonomis dalam mengembangkan usaha milik orang tuanya. Selanjutnya menurut Tshajanow dalam Tohir (1965), ketika anak-anak menjadi dewasa, mereka akan tertarik dengan ide-ide baru, mereka bisa mempengaruhi orang tuanya. Ini artinya bahwa anak-anak yang telah dewasa dapat mempengaruhi orang tuanya sebagai pemegang keputusan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Tabel berikut ini menyajikan jumlah tanggungan keluarga di daerah penelitian.

Tabel 2. Jumlah Anggota Keluarga Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu

No	Jumlah Tanggungan Keluarga (Orang)	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Rata-rata	Range
1	Sedikit (1-2)	40	39,6	2,9	1-6
2	Sedang (3-4)	53	51,4		
3	Banyak(5-6)	9	9		
	Total	102	100		

Sumber: *Hasil Penelitian 2009*

Kisaran jumlah anggota yang menjadi tanggungan keluarga di daerah penelitian antara 1-6 orang. Responden yang mempunyai jumlah tanggungan keluarga 1-2, biasanya masih keluarga muda, namun boleh dikatakan sudah mandiri lepas dari tanggung jawab orang tuanya. Biasanya mereka menjadi nelayan atau pedagang karena mengikuti bakat dari orang tuanya. Sementara responden yang mempunyai jumlah keluarga banyak (5-6 orang), karena dia harus menanggung orang tuanya dan mungkin adiknya, kecuali anak dan istrinya dan biasanya mereka tinggal serumah. Bagi petani kepala keluarga yang telah mempunyai anak dewasa diharapkan anak tersebut dapat mempengaruhi pola pikir orang tuanya sekaligus menjamin ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga apabila pemerintah akan memperkenalkan program-program pembangunan pada masyarakat (*Community Development Program*).

Pendidikan Formal

Pendidikan adalah faktor yang menggambarkan kualitas untuk bisa terlibat dalam setiap kegiatan pada sebuah organisasi. Manusia yang mempunyai harapan yang besar terhadap suatu tujuan kegiatan pembangunan, akan mempunyai perilaku yang baik

terhadap kegiatan-kegiatan itu sendiri. Penelitian yang dilakukan Santiago (1981), membuktikan bahwa rendahnya pendidikan formal maupun diidentifikasi sebagai faktor penghambat dalam melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Dalam dunia usaha pendidikan sangatlah mempengaruhi para pelakunya dalam hal berfikir, bertindak, dan berbuat dalam mengelola usahanya. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan responden di daerah penelitian, disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Pendidikan Formal Responden di Pesisir Kota Bengkulu

No	Pendidikan Formal (Tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	1	0,09
2	SD	28	27,7
3	SMP dan Sederajat	39	37,6
4	SMA dan Sederajat	33	34,5
5	Sarjana	1	0,09
	Total	102	100

Sumber : Hasil penelitian 2009

Dari tabel di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan responden sudah cukup tinggi, sebagian besar masyarakat pesisir Kota Bengkulu berada pada level pendidikan sedang, yaitu sudah tamat SMP dan SMA (72,1%). Namun demikian masih ada responden yang berpendidikan rendah (SD) sebanyak 27,7%, bahkan masih ditemukan responden yang tidak punya pendidikan sama sekali (tidak sekolah), yaitu 0,09%.

Melihat data di atas masih ada masyarakat yang mempunyai pendidikan rendah dan bahkan masih ditemukan yang tidak berpendidikan, maka masih diperlukan pendidikan tambahan yaitu pendidikan non formal misalnya penyuluhan, penerangan,

dan pelatihan-pelatihan, dan kursus-kursus, tentunya apabila pemerintah menginginkan untuk mengintrodusir program-program pembangunan yang baru.

Jenis Pekerjaan

Seiring dengan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan, kehidupan manusia pun bertambah kompleks. Begitu pula dengan jenis-jenis kegiatan manusia yang paling mendasar dan sangat penting adalah masalah penghidupan. Ketika kita menyinggung tentang penghidupan manusia, maka pembahasannya tidak akan lengkap jika kita tidak mengupas segala hal yang berkaitan dengan mata pencaharian atau pekerjaan.

Mata pencaharian atau pekerjaan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Beberapa bidang mata pencaharian yang umum dilakukan oleh masyarakat pedesaan di Indonesia ialah petani, nelayan, ABRI, PNS, pedagang, buruh dan lain-lain. Untuk mengetahui jenis pekerjaan masyarakat pesisir Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Jenis Mata Pencaharian (Pekerjaan) Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Buruh	1	1,1
2	Dagang	79	78,2
3	Nelayan	18	17,8
4	Karyawan	4	2,9
	Total	102	100

Sumber : Hasil Penelitian 2009

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar masyarakat pesisir Kota Bengkulu mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang (78,2%), biasanya mereka membuka warung atau jualan kecil-kecilan (jagung bakar, udang dan ikan goreng) dan berdagang ikan keliling, kemudian terbanyak kedua adalah sebagai nelayan (17,8%). Sisanya sebagai karyawan baik swasta maupun PNS, dan yang paling sedikit sebagai buruh (1,1%).

Pengalaman Kerja

Pengalaman berusaha (bekerja) menunjuk pada lamanya bidang pekerjaan yang ditekuni yang pada akhirnya terkait dengan kemampuan dalam pengelolaan bidang usahanya. Semakin lama mereka berusaha, maka pengalaman yang dimilikinya juga semakin banyak pula. Menurut Sukartawi, dkk (1993) semakin lama petani berusahatani, maka petani semakin cenderung mempunyai sikap yang lebih berani dalam menanggung resiko penerapan suatu teknologi baru atau perubahan-perubahan yang ada dalam bidang pertanian. Karena semakin lama petani berusaha tani ternyata mereka lebih respon dan cepat tanggap terhadap gejala yang mungkin terjadi di bidang pertanian. Apabila pada akhirnya nanti mengalami suatu kegagalan mereka sudah tidak canggung lagi dalam menanggulangi kegagalan tersebut. Sehingga dapat diartikan bahwa petani yang mempunyai pengalaman banyak, mereka lebih trampil dan mempunyai pengetahuan tentang peluang yang mungkin terjadi akibat adanya perubahan-perubahan di bidang pertanian. Pendapat Sukartawi (1993) ini juga bisa berlaku di bidang pekerjaan lainnya

misalnya berdagang, nelayan dll. Dari hasil penelitian tentang pengalaman kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Pengalaman Kerja Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu

No	Pengalaman (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Rata-rata	Range
1	1-12	72	71,2	10,81	1-38
2	13-25	23	21,7		
3	26-38	7	8,1		
	Total	102	100		

Sumber : Hasil Penelitian 2009

Dari data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai pengalaman kerja antara 1-12 tahun di bidang usaha yang ditekuninya. Tetapi hal ini tidak selalu mencerminkan bahwa mereka mempunyai pengalaman yang sedikit. Bisa saja hal ini karena memang umur mereka masih relative muda. Dalam bidang pembangunan justru penduduk muda inilah yang berani mengambil resiko dalam mengadopsi atau menerima hal-hal baru yang ditawarkan oleh agen pembaharu.

Modal Usaha

Modal usaha adalah sejumlah uang atau barang yang dipergunakan untuk menjalankan suatu usaha atau untuk membiayai operasional perusahaan tanpa mengorbankan aktiva yang lain guna untuk memperoleh laba yang optimal. (Yudhistira Blog's.Com, Kumpulan Coretan Sederhana Tempat Berbagi Cerita, 2008).

Berbicara mengenai modal, di dalam bisnis dikenal 2 pengertian modal. Pertama, modal yang dimiliki sendiri, dalam artian pelaku bisnis tersebut menyisihkan sejumlah uang yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan usahanya. Kedua, modal dari luar

milik sendiri yaitu modal yang diperoleh dari lembaga perbankan atau non perbankan.

Untuk modal yang diperoleh dari sumber non perbankan, sumbernya cukup banyak untuk mendapatkannya, bisa dari lembaga keuangan non bank (seperti koperasi dan LEPP-M3), individu-individu, sanak kerabat dan banyak lagi sumber keuangan informal lainnya. Pengelolaan dan mekanisme imbal-baliknya berbeda-beda tergantung dari kesepakatan antar pihak. Berikut ini disajikan kategori modal usaha responden di pesisir Kota Bengkulu.

Tabel 6. Modal Usaha Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu

No	Modal Usaha (Rp)	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Rata-rata	Range
1	130.000-1.347.500	75	73,2	903.105	130.000-5.000.000
2	1.347.501-2.565.000	17	16,8		
3	2.565.001-3.782.500	3	2,9		
4	3.782.501-5.000.000	1	1,2		
5	Tanpa Modal	6	5,9		
	Total	102	100		

Sumber : Hasil Penelitian 2009

Jika dilihat dari data pada tabel di atas, terlihat bahwa responden yang modal usahanya (Rp 130.000-1.347.500), menduduki jumlah paling banyak (73,2%), kemudian 16,8% bermodalkan sampai Rp 2.565.000, dimana rata-rata hanya Rp 903.105. Dalam dunia usaha, hal ini termasuk kategori modal kecil. Memang kenyataannya masyarakat di pesisir Kota Bengkulu ini, mata pencahariannya sebagian besar berdagang kecil-kecilan misalnya membuka warung manisan, pedagang ikan asin, pedagang keliling

Penerimaan Rumah Tangga

Penerimaan keluarga atau rumah tangga merupakan salah satu faktor yang dominan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Segala kegiatan dalam keluarga lebih diutamakan pada pemenuhan dan pemuasan kebutuhan hidup keluarga, selanjutnya berusaha sedapat mungkin agar kebutuhan dapat terpenuhi secara wajar. Penerimaan keluarga dapat diartikan sebagai penghasilan dari seluruh anggota keluarga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan dalam keluarga. Menurut Sumardi (1985) *dalam* Khiyar (2004), istilah penghasilan keluarga adalah seluruh penerimaan seseorang atau kelompok baik berupa uang maupun barang, dari sumber sendiri maupun dari pihak lain, yang dinilai dengan uang berdasarkan atas harga yang berlaku pada jangka waktu tertentu. Sumber penerimaan keluarga atau rumah tangga dibedakan menjadi 2 yaitu dari pekerjaan pokok dan dari pekerjaan sampingan. Untuk mengetahui penerimaan keluarga masyarakat pesisir Kota Bengkulu dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 7. Penerimaan Rumah Tangga

No	Penerimaan Rumah Tangga (Rp)	Sebelum PEMP		Sesudah PEMP	
		Orang	%	Orang	%
1	500.000-1.000.000	31	30,6	3	2,9
2	1.000.001-1.500.000	44	42,5	31	29,7
3	1.500.001-2.000.000	19	19,1	38	37,6
4	2.000.001-2.500.000	4	3,9	21	20,7
5	2.500.001-3.000.000	4	3,9	2	2,2
6	➤ 3.000.000	0	0	7	6,9
	Total	102	100	102	100
	Rata-rata	Rp 1.443.663		Rp 2.009.901	
	Range	500.000-3.000.000		800.000-4.250.000	

Sumber : Hasil Penelitian 2009

Jika dilihat dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat pesisir kota Bengkulu penerimaan rumah tangganya di kisaran Rp 1.000.001-1.500.000 yaitu 42,5%, tetapi setelah mereka mendapatkan bantuan dana dari PEMP maka penerimaan rumah tangga yang dominan pada kisaran Rp 1.500.001-2.000.000, yaitu sejumlah 37,6%. Jika dilihat dari rata-rata penerimaan rumah tangga secara keseluruhan, sebelum mereka mendapat bantuan dana PEMP sebesar Rp 1.443.663, naik menjadi Rp 2.009.901 setelah mendapat bantuan dana untuk meningkatkan usahanya dari PEMP. Hal ini dapat disimpulkan bahwa bantuan dana dari PEMP telah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat pesisir Kota Bengkulu untuk memperkuat modalnya dalam berusaha, dan pada akhirnya akan menambah penerimaan rumah tangganya. Apabila dilihat penerimaan rumah tangga yang bersumber dari usaha perdagangan yang dilakukan, maka disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Besarnya Penerimaan Usaha Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu

No	Pendapatan Usaha (rupiah/bulan)	Jumlah (orang)	%	Rata-rata	Range
1	200.000 – 1.800.000	89	88,1	1.221.287	200.000- 4.250.000
2	1.800.001-3.400.000	12	10,8		
3	➤ 3.400.000	1	1,1		
	Total	102	100		

Sumber : Hasil Penelitian 2009

Dilihat dari tabel 8 di atas dapat dinyatakan bahwa sebagian besar masyarakat pesisir Kota Bengkulu mempunyai penerimaan dari usahanya antara Rp 200.000 – 4.250.000, hal ini bisa dimaklumi karena rata-rata mereka hanya bermata pencaharian sebagai pedagang kecil, misalnya jualan jagung bakar di pantai Tapak Paderi, jualan

minuman dan makanan kecil, dan sebagai pedagang ikan keliling atau buka tenda di sepanjang pantai Pasar Bengkulu dan sekitarnya.

Bentuk dan Status Kepemilikan Rumah

Pembangunan kesejahteraan masyarakat di pesisir Kota Bengkulu pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan kesejahteraan masyarakat Propinsi Bengkulu secara keseluruhan. Tingkat kesejahteraan dari suatu masyarakat antara lain bisa dilihat dari pengeluaran rumah tangga, bentuk dan status kepemilikan rumah. Untuk memperjelas karakteristik kesejahteraan masyarakat pesisir Kota Bengkulu berdasarkan bentuk dan status kepemilikan rumah, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Bentuk dan Status Kepemilikan Rumah.

No	Uraian	Bentuk			Status			
		Permanen	Semi Permanen	Total	Milik	Sewa	Numpang	Total
1	Jumlah	64	38	102	79	20	3	101
2	Persentase	63,3	36,7	100	77,2	19,8	3	100

Sumber : Hasil penelitian, 2009

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar penduduk pesisir Kota Bengkulu mempunyai tingkat kesejahteraan yang cukup baik, ini terlihat mayoritas rumahnya sudah permanen dan sudah dimiliki sendiri. Namun demikian masih ada keluarga yang rumahnya semi permanen (36,7%) dan masih ada 19,% yang masih menyewa atau numpang di rumah keluarganya. Biasanya mereka masih tergolong keluarga muda yang baru saja merintis hidup.

Pengeluaran Rumah tangga

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan tingkat pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga adalah semua biaya (cost) yang dibelanjakan oleh rumah tangga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Pengeluaran rumah tangga tidak saja dibelanjakan hanya untuk keperluan pangan, pendidikan, kesehatan, rumah tempat tinggal (primer) tetapi juga untuk keperluan lainnya (sekunder), misalnya untuk rekreasi, bersosialisasi dll. Secara umum tingkat pengeluaran rumah tangga akan dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya, semakin tinggi tingkat pendapatan keluarga maka juga akan semakin tinggi tingkat pengeluarannya. Berikut ini rincian pengeluaran rumah tangga masyarakat pesisir Kota Bengkulu.

Tabel 10. Pengeluaran Rumah Tangga Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu

No	Pengeluaran Rumah Tangga (Rp)	Sebelum PEMP		Sesudah PEMP	
		Orang	%	Orang	%
1	500.000-1.000.000	43	42,5	8	7,9
2	1.000.001-1.500.000	47	45,5	44	42,5
3	1.500.001-2.000.000	9	8,9	38	37,6
4	2.000.001-2.500.000	3	3,1	9	8,9
5	2.500.001-3.000.000	0	0	3	3,1
	Total	102	100	102	100
	Rata-rata	Rp 1.217.908		Rp 1.709.694	
	Range	500.000-2.500.000		600.000-3.500.000	

Sumber : Hasil Penelitian 2009

Dilihat dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa pengeluaran masyarakat pesisir Kota Bengkulu sebelum menerima bantuan dana dari PEMP, sebagian besar dalam kisaran Rp 500.000-1.500.000, yaitu 88%. Sementara sesudah mereka menerima dana dari PEMP, sebagian besar pengeluaran rumah tangganya meningkat pada kisaran

Rp 500.000-2.000.000. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah penelitian telah meningkat. Sementara jika dilihat dari rata-rata pengeluaran (konsumsi) rumah tangga, sesudah PEMP semakin menurun. Dari hasil penelitian diketahui ternyata sebagian dana, mereka tambahkan sebagai modal dalam usahanya. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin besar jiwa wirausaha yang mereka punyai.

5.2 Keragaan Program PEMP

Keragaan yang dimaksud adalah bagaimana tahapan atau proses dalam implementasi program PEMP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran, yang meliputi kajian *input* (masukan), *process* (pelaksanaan) dan *output* (keluaran). Penilaian terhadap kinerja input, proses dan output diolah dari tanggapan yang diberikan oleh responden terhadap indikator-indikator yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini. Adapun capaian implementasi program PEMP disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 11. Capaian implementasi kegiatan PEMP

No	Tahapan Kegiatan	Capaian Hasil (%)
1	Input	73, 55
2	Proses	58.91
3	Output	41.01

Sumber : Hasil Penelitian 2009

Input adalah segala sesuatu yang menjadi masukan dalam implementasi program PEMP di Kota Bengkulu. Implementasi tahapan ini mencapai 73,55 % Sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam menjalankan program PEMP, baik dari sisi

pendidikan, pengetahuan dan pemahaman mereka yang terlibat dalam program sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan program. Pelibatan masyarakat tanpa membedakan status sosial menjadi kekuatan tersendiri dalam implementasi program PEMP, karena menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) hal tersebut merupakan salah satu dari lima syarat yang harus dilakukan dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi dan pelatihan yang pada dasarnya merupakan pendidikan untuk masyarakat memberikan penguatan-penguatan bagi kecepatan laju program yang dijalankan. Kelemahan dalam tahapan ini menurut masyarakat pemanfaat adalah tidak adanya lembaga lain yang mendukung pelaksanaan program baik itu lembaga permodalan, lembaga pemasaran ataupun lembaga lainnya.

Proses adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah input menjadi output. Implementasi tahapan ini hanya mencapai 58.91 %. Penetapan kelompok sasaran sudah sesuai dengan keinginan sebagian besar masyarakat pemanfaat, penyaluran bantuan pun sudah berjalan dengan baik dimana bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan dalam jumlah yang tepat. Tidak optimalnya tahapan ini dikarenakan lemahnya pengawasan oleh pihak terkait dalam pelaksanaannya, terbukti masih banyak anggota KMP yang menunggak pinjaman yang pernah disalurkan melalui kelompok. Penunggakan ini berakibat kepada keberlanjutan perguliran program, karena hanya mereka yang sudah melunasi pinjaman pada tingkat kelompoklah yang lebih berhak untuk mendapatkan peminjaman kepada pihak Koperasi LEPP-M3 Bina Masyarakat Pesisir.

Output adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, yaitu keragaan produksi baik produksi utama maupun produksi sampingan. Implementasi tahapan ini hanya mencapai 41.01 %. Meskipun terdapat peningkatan produktivitas dan kualitas produksi dari sebagian usaha masyarakat, tetapi output program secara keseluruhan tidak tercapai secara optimal. Masih adanya usaha yang belum berkembang, tidak adanya produksi sampingan dan lambatnya percepatan jumlah masyarakat pemanfaat program menyebabkan output tidak tercapai. Lambatnya percepatan penambahan individu masyarakat pemanfaat karena di dalam aturannya, pihak lembaga tidak memberikan kesempatan peminjaman Dana Ekonomi Produktif kepada mereka yang masih menunggak pinjaman melalui kelompok, sehingga jumlah anggota Koperasi Bina Masyarakat Pesisir yang melakukan transaksi pinjaman juga tidak begitu banyak mengalami perubahan setiap tahunnya.

Meskipun tahapan pelaksanaan program tidak dapat berjalan secara optimal, tetapi sebagian besar masyarakat (92 %) masih berharap program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir ini masih dapat dilanjutkan, entah itu dalam pola program yang sama ataupun dalam pola baru yang berbeda dari sebelumnya. Hal ini berarti, usaha pemberdayaan ini haruslah tetap dilanjutkan karena akan sangat membantu masyarakat dalam menjalankan usaha mereka. Sedangkan 8 % responden beranggapan bahwa program-program pemberdayaan seperti PEMP hanya bersifat sesaat seumur proyek dan tidak akan menjadikan masyarakat lebih mandiri, karena kurangnya usaha pelaksana program untuk mengawasi langsung bagaimana penggunaan bantuan tersebut, sehingga keberlanjutan program bukan menjadi prioritas yang penting.

Oleh karena itu perlu adanya suatu disain yang membuat implementasi program dapat berjalan optimal sehingga masyarakat pemanfaat mendapatkan alternatif dan mampu memiliki kebebasan untuk memilih alternatif yang terbaik bagi dirinya sehingga dapat lebih dinamis dan progresif secara berkelanjutan.

5.3 Analisis Tingkat Pengembalian

Dana Ekonomi Produktif (DEP) program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kota Bengkulu, pada awalnya dikelola oleh lembaga dengan nama Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina Bina Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu (LEPP-M3 Bina Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu). Seiring dengan perkembangan permodalan dan berjalannya waktu, LEPP-M3 ini merubah wujudnya menjadi sebuah lembaga koperasi yang diberi nama Koperasi Bina Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu. Koperasi inilah yang hingga saat ini mengelolaa dana PEMP dan perkembangan dana tersebut, termasuk melaksanakan perguliran DEP.

DEP yang digulirkan LEPP-M3 atau koperasi kepada kelompok atau individu masyarakat pemanfaat dikenakan bunga. Pada awal program PEMP, kelompok pemanfaat disebut dengan istilah KMP (kelompok masyarakat pemanfaat) dan SPDN (solar packed dealer nelayan). Besarnya bunga berbeda-beda untuk SPDN dan KMP. Khusus untuk SPDN, dikenakan bunga 11% dan KMP dikenakan bunga 8% per tahun. Menurut LEPP-M3, penetapan bunga yang lebih tinggi untuk SPDN karena usaha ini dianggap lebih pasti dan lebih menguntungkan dibanding usaha KMP. Meskipun demikian, bunga ini masih lebih rendah dibandingkan dengan bunga yang berlaku di bank atau lembaga keuangan lainnya, baik formal maupun non-formal. Sebelum

program PEMP, umumnya masyarakat meminjam uang kepada pelepas uang informal (rentenir) dengan bunga yang tinggi. Rendahnya bunga yang ditetapkan karena program PEMP merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Disamping bunga rendah, fasilitas lain yang diberikan pada masyarakat pada awal program PEMP adalah kemudahan untuk memperoleh pinjaman tanpa jaminan/agunan apapun.

Program PEMP di Kota Bengkulu telah menggulirkan dana ekonomi produktif sebesar Rp 1.662.500.000, yang terdiri dari Rp 200.000.000 untuk SPDN dan Rp 1.462.500.000 untuk non-SPDN (KMP). Jika pengembalian dana bergulir dari KMP lancar, maka LEPP-M3 akan mengumpulkan bunga sebesar Rp 139.000.000, yang terdiri dari Rp 22.000.000 (11% dari Rp 200.000.000) dari SPDN dan Rp 117.000.000 (8% dari Rp 1.462.500.000) dari usaha non-SPDN setiap tahunnya, atau per bulannya setara dengan Rp 11.583.333. Pada kondisi ini, biaya operasional LEPP-M3 tentu tidak menjadi persoalan lagi. Dari jumlah bunga, ada bagian yang dapat dimanfaatkan oleh LEPP-M3 untuk biaya operasional.

Setelah menikmati bunga rendah dan tanpa agunan, KMP masih diberi fasilitas berupa tenggang waktu pengembalian pinjaman. Tenggang waktu diberikan dengan maksud agar setiap anggota KMP memiliki waktu atau kesempatan berusaha terlebih dahulu sebelum melakukan pengembalian. KMP yang mendapat tenggang waktu satu bulan, berarti jika KMP menerima pencairan dana pada Bulan Januari maka angsuran pertama harus dibayar pada Bulan Maret. Tanpa tenggang waktu (tenggang waktu 0 bulan) berarti, jika pencairan Bulan Januari maka angsuran pertama pada Bulan Februari.

Tenggang waktu yang diberikan LEPP-M3 untuk KMP Tahun 2002 berbeda dengan KMP Tahun 2003. Pada tahun 2002, tenggang waktu berkisar antara 2-3 bulan berdasarkan KMP dan kesepakatan antara LEPP-M3 dengan masing-masing KMP. Sedangkan pada Tahun 2003, tenggang waktu berkisar antara 0-1 bulan.

Berbeda dengan awal program, dimana saat ini perguliran DEP dilakukan pada individu masyarakat pemanfaat. Individu yang mendapatkan pinjaman sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh LEPP-M3 atau koperasi, dan tentu sudah dilakukan studi kelayakan terhadap proposal pinjaman yang diajukan oleh setiap individu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk peminjam yang masih aktif sebagai peminjam (saat penelitian dilaksanakan), kisaran pinjaman individu berkisar antara Rp 500.000 sampai dengan Rp 8.000.000. Untuk pinjaman sejumlah itu, jangka waktu yang disepakati antara koperasi dengan peminjam berkisar antara 3 hingga 48 bulan. Klasifikasi jumlah pinjaman responden disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 12. Jumlah Pinjaman Responden

No	Kategori Pinjaman	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jumlah	
			orang	%-tase (%)
1	Rendah	500.000 – 3.000.000	95	93,14
2	Sedang	3.000.001 – 5.500.000	6	5,88
3	Tinggi	5.500.001 – 8.000.000	1	0,98
Jumlah / Rata-rata		1.763.725	102	100

Sumber : Hasil Penelitian 2009

Tabel diatas menginformasikan bahwa umumnya responden (sekitar 93,14%) yang melakukan pinjaman dikategorikan dalam jumlah pinjaman yang rendah, yaitu

berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 3.000.000. Rata-rata jangka waktu pinjaman responden adalah :

Tabel 13. Jangka Waktu Pinjaman Responden

No	Kategori Jangka Waktu	Jangka Waktu (Bulan)	Jumlah	
			orang	%-tase (%)
1	Pendek	3 – 18	93	91,18
2	Sedang	19 – 33	8	7,84
3	Panjang	34 - 48	1	0,98
Jumlah / Rata-rata		12	102	100

Sumber : Hasil Penelitian 2009

Jangka waktu pinjaman responden umumnya termasuk dalam pinjaman dengan jangka waktu pendek, yaitu berkisar antara 3 – 18 bulan. Rata-rata jangka waktu pinjaman sekitar satu tahun atau 12 bulan. Distribusi frekuensi jangka waktu ini hampir sama dengan distribusi frekuensi jumlah pinjaman yang responden, yang berarti bahwa jangka waktu yang pendek ini umumnya adalah pinjaman responden dengan kategori rendah. Dengan demikian, kisaran pinjaman antara Rp 500.000 – Rp 3.000.000 memiliki jangka waktu pinjaman antara 3 – 18 bulan.

Semua responden mengaku bahwa pada saat pengajuan proses peminjaman tidak ada jaminan atau agunan yang diberikan dalam bentuk apapun. Tentu, kondisi ini menjadi nilai lebih bagi masyarakat untuk menjadikan koperasi sebagai salah satu sumber modal alternatif. Responden juga menyatakan bahwa prosedur peminjaman yang diterapkan oleh koperasi termasuk dalam kategori mudah, yang berarti tidak menyulitkan masyarakat yang akan mengajukan pinjaman. Sebagai kontrol bagi kedua

belah pihak, baik koperasi maupun peminjam, koperasi menggunakan buku kontrol yang dapat diakses oleh peminjam.

Proses pencairan yang diterapkan koperasi juga tidak terlalu lama. Lama waktu mulai dari pengajuan proposal pinjaman oleh calon peminjam sampai dengan dicairkannya pinjaman oleh koperasi hanya memerlukan waktu antara 2 hingga 15 hari. Secara detail, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 14. Lama Waktu Proses Peminjaman Responden

No	Kategori Lama Waktu	Lama Waktu (Hari)	Jumlah	
			orang	%-tase (%)
1	Cepat	2 - 6	28	27,45
2	Sedang	7 - 10	70	68,63
3	Lambat	11 - 15	4	3,92
Jumlah / Rata-rata		8	102	100

Sumber : Hasil Penelitian 2009

Proses pencairan pinjaman yang cepat adalah lama waktu antara pengajuan proposal pinjaman oleh responden hingga pencairan hanya memerlukan waktu maksimal 6 hari. Ini berarti, dalam jangka waktu 2 – 6 hari, petugas koperasi melakukan verifikasi proposal dan menilai kelayakan pinjaman yang dilakukan oleh peminjam. Hal ini dapat dilakukan oleh koperasi mengingat pengalaman koperasi dan melakukan verifikasi, sehingga tidak dibutuhkan waktu yang lama. Koperasi dengan nama awal LEPP-M3 pertama kali dibentuk pada Tahun 2002, dengan waktu yang sudah hampir 7 tahun dianggap cukup memberikan pengalaman bagi para pengurus mengingat pengurus antara LEPP-M3 dengan koperasi saat ini relatif merupakan orang yang sama.

Dengan variasi pinjaman yang cukup tinggi dan waktu pencairan yang cepat, umumnya pemanfaatan dana oleh peminjam adalah untuk tambahan modal usaha dan memenuhi kebutuhan keluarga. Sekitar 97,06% responden menyatakan bahwa pinjaman yang diperoleh dari koperasi dimanfaatkan untuk tambahan modal usaha dan pemenuhan kebutuhan keluarga dan hanya sekitar 2,94% yang menyatakan pemanfaatan pinjaman hanya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.

Dengan berbagai bentuk kemudahan dalam peminjaman, diharapkan mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian. Dari 102 responden, dapat diklasifikasikan tingkat pengembalian dalam tiga kategori, dengan data rinci disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 15. Tingkat Pengembalian Responden

No	Kategori Pengembalian	Tingkat Pengembalian (%)	Jumlah	
			orang	%-tase (%)
1	Rendah	9,00 – 39,33	17	16,67
2	Sedang	39,34 – 69,66	16	15,69
3	Tinggi	69,67 – 100,00	69	67,65
Jumlah / Rata-rata		30,33	102	100

Sumber : Hasil Penelitian 2009

Rata-rata tingkat pengembalian nasabah koperasi sekitar 30,33%, dimana tingkat pengembalian yang rendah hanya dialami sekitar 16,67 % responden. Tingkat pengembalian nasabah dapat dikategorikan lancar, mengingat distribusi frekuensi yang paling banyak pada kategori pinjaman tinggi, yaitu sekitar 69,67 – 100 %. Bahkan data menunjukkan bahwa 32 orang dari 102 orang (responden) atau sekitar 31,37 % dari

jumlah responden termasuk dalam pinjaman dengan tingkat pengembalian sebesar 100%, yang berarti pinjaman yang diperoleh oleh peminjam telah dibayar lunas.

Dengan tingkat pengembalian yang lancar, diharapkan LEPP-M3 atau koperasi dapat menutupi biaya operasionalnya dan mengalokasikan dana keagamaan/sosial untuk masyarakat dari bunga pinjaman yang dikembalikan peminjam. Diharapkan pula DEP dapat terus berkembang, bergulir dan dinikmati oleh setiap masyarakat pesisir di Kota Bengkulu. Hal ini sesuai dengan rancangan PEMP, dimana DEP merupakan dana bergulir yang apabila telah terkumpul dari penngembalian peminjam maka akan digulirkan kembali kepada masyarakat yang sama atau masyarakat yang lain (*revolving fund*).

5.4 Analisis Pendapatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kisaran pendapatan usaha utama responden berkisar antara Rp 200.000 hingga Rp 5.000.000 per bulan. Rata-rata pendapatan responden sekitar Rp 1.221.287 per bulan. Pendapatan rumah tangga responden tentu tidak hanya berasal dari pendapatan usaha utama, tetapi juga ditambah lagi dengan pendapatan selain usaha utama. Secara rata-rata saat penelitian dilaksanakan, penerimaan rumah tangga responden (yang bersumber dari pendapatan usaha utama dan pendapatan selain usaha utama) sekitar Rp 2.009.901 per bulan dengan kisaran antara Rp 800.000 sampai dengan Rp 4.250.000 per bulan. Sedangkan untuk pengeluaran rumah tangga, rata-rata pengeluaran sekitar Rp 1.709.694 per bulan dengan kisaran pengeluaran antara Rp 600.000 – Rp 3.500.000 per bulan. seperti yang telah dijelaskan

di atas merupakan data yang diperoleh saat penelitian sehingga data tersebut merupakan data pendapatan dan pengeluaran rumah tangga setelah mendapatkan program PEMP. Kondisi ini tentu berbeda dengan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga sebelum mendapatkan program PEMP. Perbandingan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga antara sebelum dan setelah program PEMP disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 16. Perbandingan Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Sebelum dan Setelah PEMP

No	Uraian	Sebelum PEMP (Rp/bln)		Setelah PEMP (Rp/bln)	
		Pendapatan	Pengeluaran	Pendapatan	Pengeluaran
1	Maksimal	500.000	500.000	800.000	600.000
2	Minimal	3.000.000	2.500.000	4.250.000	3.500.000
3	Rata-rata	1.443.663	1.217.908	2.009.901	1.709.694

Sumber : Hasil Penelitian 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum pendapatan dan pengeluaran rumah tangga setelah program PEMP lebih besar dibandingkan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga sebelum program PEMP. Secara rata-rata, pendapatan rumah tangga setelah program PEMP meningkat sekitar 39,22% dari pendapatan rumah tangga sebelum program PEMP. Sedangkan pengeluaran rumah tangga setelah program PEMP meningkat sekitar 40,38% dari pengeluaran rumah tangga sebelum program PEMP.

Data dan uraian di atas menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan rumah tangga secara proporsional juga diikuti oleh peningkatan pengeluaran rumah tangga. Meskipun demikian, selalu terdapat selisih antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, baik sebelum maupun setelah program PEMP. Sebelum PEMP, pendapatan rumah tangga lebih besar dari pengeluaran rumah tangga sekitar 18,54% dan setelah

PEMP, pendapatan rumah tangga lebih besar dari pengeluaran rumah tangga sekitar 17,55%. Ini berarti, tersedia dana yang sangat potensial bagi rumah tangga untuk menabung atau membayar cicilan pinjaman yang diperoleh dari pihak lain, termasuk LEPP-M3 atau koperasi. Kondisi ini juga yang membuat tingginya tingkat pengembalian pinjaman responden.

Seperti telah dijelaskan di atas, pendapatan rumah tangga terdiri dari pendapatan usaha utama dan pendapatan lain-lain, yang merupakan pendapatan selain usaha utama dan sering diistilahkan dengan pendapatan sampingan. Dalam rumah tangga, kontribusi terhadap pendapatan juga turut diberikan oleh adanya anggota rumah tangga yang lain yang bekerja. Dengan demikian, faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi besarnya pendapatan adalah 1) umur responden, 2) jumlah anggota keluarga, 3) pendidikan formal, 4) jenis pekerjaan, 5) pengalaman usaha, 6) besarnya modal usaha dan 7) besarnya pinjaman yang diperoleh dari program PEMP.

Untuk melihat pengaruh dan besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap pendapatan rumah tangga, dilakukan analisis regresi linier berganda dimana :

- Y : pendapatan rumah tangga (Rp/bln)
- X1 : umur responden (tahun)
- X2 : jumlah anggota keluarga (orang)
- X3 : pendidikan formal (tahun)
- X4 : jenis pekerjaan (1 = perikanan & kelautan, 0 = non perikanan & kelautan)
- X5 : pengalaman usaha (tahun)
- X6 : besarnya modal usaha (Rp)
- X7 : besarnya pinjaman yang diperoleh dari program PEMP (Rp)

Khusus untuk variable X4, yaitu jenis pekerjaan, kode 1 diberikan kepada jenis pekerjaan yang termasuk dalam kategori perikanan dan kelautan. Jenis pekerjaan ini terkait dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan, yang terdiri dari nelayan, pedagang ikan (baik ikan basah maupun ikan kering), dan pengolah ikan. Sedangkan kode 2 diberikan kepada jenis pekerjaan non perikanan dan kelautan, seperti pedagang makanan (seperti gorengan dan bakso), pedagang manisan (warung), pedagang sayur dan usaha kredit barang.

Dari 102 responden, hanya sekitar 101 orang yang memiliki data yang lengkap mulai dari pendapatan dan enam variabel X (variabel independen). sehingga analisis regresi dilakukan terhadap data 101 orang responden.

Hasil analisis regresi linier berganda dengan tujuan untuk menguji pengaruh variabel independen (variabel-variabel X) terhadap variabel dependen (variabel Y) disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 17. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0.594616
R Square	0.353568
Standard Error	550949.9
Observations	101

ANOVA					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F hitung</i>	<i>F Tabel</i>
Regression	7	1.54E+13	2.21E+12	7.266652	2.109658
Residual	93	2.82E+13	3.04E+11		
Total	100	4.37E+13			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>t tabel</i>
Intercept	1413797	508603	2.779765	1.983972
X1	-16172	9304.832	-1.73802	
X2	266325.4	60570.26	4.396967	
X3	18168.34	24692.2	0.735793	
X4	-127230	118904	-1.07002	
X5	14967.46	8987.942	1.665283	
X6	0.316572	0.07706	4.108128	
X7	-0.03528	0.049197	-0.71718	

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R square) sekitar 35,36%, yang berarti kemampuan tujuan variabel X yang dimasukkan dalam model menjelaskan pengaruhnya terhadap pendapatan (variabel Y) sebesar 35,36%. Sekitar 64,64% variabel independen lainnya yang mempengaruhi pendapatan tidak dimasukkan dalam model ini. Tentu, nilai minimal R square adalah 0% dan nilai tertinggi adalah 100%. Jika nilai R square di bagi dalam tiga kategori, maka nilai R square antara 0 – 33,33 % masuk dalam kategori rendah, 33,34 – 66,66 % masuk dalam kategori sedang dan 66,67-100 % masuk dalam kategori tinggi. Dengan demikian, nilai R square model di atas yang sebesar 35,36% termasuk dalam kategori sedang.

Secara bersama-sama, tujuan variabel X yang terdiri dari umur responden, jumlah anggota keluarga, pendidikan formal, jenis pekerjaan, pengalaman usaha, besarnya modal usaha dan besarnya pinjaman yang diperoleh dari program PEMP berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan rumah tangga. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *F hitung* sebesar 7,27, dimana nilai ini jauh lebih besar dari nilai *F tabel* yang hanya sekitar 2,11, yang diuji pada taraf kepercayaan 95 % ($\alpha = 0,05$).

Model persamaan linier dari model di atas berdasarkan hasil analisis regresi adalah :

$$Y = 1.413.797 - 16.172X_1 + 266.325,4X_2 + 18.168,34X_3 - 127.230X_4 + 14.967,46X_5 + 0.32X_6 - 0,035 X_7$$

Meskipun secara bersama-sama tujuh variabel independen berpengaruh nyata terhadap pendapatan, namun tidak semua variabel independen secara parsial berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan. Untuk pengaruh secara parsial, digunakan uji t yaitu membandingkan nilai *t hitung* dan *t tabel*, dimana hanya variabel yang memiliki nilai *t hitung* lebih besar dari *t tabel* yang memiliki pengaruh secara nyata terhadap pendapatan pada taraf kepercayaan 95%.

Dari tujuh variabel yang diuji, hanya ada dua variabel yang berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan pada taraf kepercayaan 95% yaitu X2 dan X6. Dua variabel tersebut adalah jumlah anggota keluarga dan besarnya modal usaha. Sedangkan lima variabel lainnya (X1, X3, X4, X5 dan X7) tidak berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan pada taraf kepercayaan 95%.

Variabel pertama yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan adalah jumlah anggota rumah tangga. Variabel ini memiliki nilai *t hitung* sebesar 4,39, lebih besar dari nilai *t tabel* yang hanya sebesar 1,98. Semakin banyak jumlah anggota suatu rumah tangga, maka akan semakin banyak pula tersedia tenaga kerja dalam keluarga untuk dapat bekerja pada sector formal maupun non-formal. Apabila anggota rumah tangga yang bisa menjadi tenaga kerja dan benar-benar bekerja, maka anggota rumah tangga yang bekerja tersebut dapat berkontribusi dalam pendapatan rumah tangga. Pendapatan dari pekerjaan tersebut dapat dikategorikan sebagai pendapatan lain-lain. Semakin banyak anggota rumah tangga yang bekerja, maka semakin banyak pula kontribusinya terhadap pendapatan total rumah tangga. Hasil analisis menunjukkan, setiap penambahan satu orang anggota rumah tangga yang bekerja dapat meningkatkan pendapatan total rumah tangga sebesar Rp 266.325,4 per bulan.

Secara umum, jumlah anggota keluarga untuk setiap rumah tangga berkisar antara 1-6 orang, dengan rata-rata sekitar 3 orang. Jika anggota rumah tangga hanya 1 orang, maka rumah tangga tersebut hanya terdiri dari kepala keluarga tanpa adanya anggota yang lain. Jika anggota rumah tangga 3 orang, maka suatu rumah tangga terdiri dari satu orang suami, satu orang isteri dan satu orang anak. Isteri dan anak yang bekerja dapat berkontribusi pada pendapatan total rumah tangga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang hanya terdiri dari satu orang anggota rumah tangga hanya satu orang responden. Ini berarti, ada sekitar 101 orang responden yang anggota rumah tangganya berjumlah dua orang atau lebih.

Dari kondisi ini dapat dikatakan bahwa setiap rumah tangga tersedia potensial tenaga kerja untuk berkontribusi dalam pendapatan total rumah tangga.

Variabel ke-dua yang berpengaruh terhadap pendapatan adalah besarnya modal usaha. Modal usaha yang dimaksud adalah modal yang dikeluarkan oleh setiap responden ketika pertama kali akan melaksanakan usaha. Variabel ini memiliki nilai *t hitung* sebesar 4,11, lebih besar dari nilai *t tabel* yang hanya sebesar 1,98. Logikanya, ketersediaan modal usaha yang cukup untuk setiap skala usaha yang akan dijalankan oleh responden akan menentukan kelancaran dari usaha tersebut. Keterbatasan modal atau yang sering disebut dengan ketidakcukupan modal untuk usaha yang akan dijalankan, akan menghambat jalannya usaha.

Pemanfaatan modal usaha biasanya untuk kebutuhan investasi (jika usaha memerlukan investasi) dan untuk kebutuhan modal kerja. Apapun jenis pekerjaannya, tetap memerlukan modal kerja. Seorang nelayan, paling tidak memerlukan modal kerja untuk bekal melaut (seperti rokok, garam, es, beras atau nasi dan sejenisnya) dan bahan bakar minyak. Seorang pedagang ikan, memerlukan modal kerja untuk membeli ikan kepada nelayan untuk selanjutnya di jual kepada konsumen. Dengan demikian, modal usaha memegang peranan penting dalam setiap usaha dan dengan modal yang cukup membuat usaha berjalan dengan lancar sehingga menambah pendapatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap peningkatan modal usaha sebesar Rp 1 akan meningkatkan pendapatan total rumah tangga sebesar Rp 0,32 per bulan, atau dengan kata lain setiap peningkatan modal usaha sebesar satu persen maka akan meningkatkan pendapatan total rumah tangga sebesar 32 % untuk setiap bulannya.

Yang menarik dari hasil analisis regresi di atas adalah tidak berpengaruhnya jumlah pinjaman yang diperoleh responden dari program PEMP melalui koperasi. Meskipun sekitar 97,06% responden menyatakan bahwa pinjaman yang diperoleh dari koperasi dimanfaatkan untuk tambahan modal usaha dan pemenuhan kebutuhan keluarga, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pinjaman responden lebih banyak dimanfaatkan (dialokasikan) untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Hal ini diperkuat lagi dengan pernyataan sebanyak 2,94% responden yang menyatakan bahwa dana pinjaman yang diperoleh dari program PEMP dimanfaatkan seluruhnya (100%) untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.

5.5 Manfaat Program

Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari adanya program PEMP ini adalah adanya bantuan pinjaman dana dengan bunga yang sangat rendah (2 %) sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan modal usaha sehingga usaha menjadi lebih lancar, selain itu juga dana pinjaman digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dalam hal ini, manfaat yang dirasakan hanya sebatas manfaat ekonomi, sedangkan manfaat selain ekonomi dari program ini tidak begitu mereka rasakan dan bisa mereka gambarkan.

Meskipun dana ekonomi produktif yang dipinjam melalui Koperasi Bina Masyarakat Pesisir tidak seluruhnya digunakan untuk modal, tetapi paling tidak, dengan mendapatkan pinjaman ada dukungan tambahan modal bagi usaha yang mereka

jalankan. Dengan bertambahnya modal, berarti mereka dapat meningkatkan volume usaha sehingga pendapatan pun dapat bertambah sehingga, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) secara keseluruhan belum mencapai hasil yang optimal sesuai harapan dan tujuan dari pelaksanaan program tersebut. Tidak adanya lembaga mitra, lemahnya pengawasan, ketidakoptimalan perencanaan usulan masyarakat, masih adanya usaha masyarakat yang belum berkembang serta lambatnya penambahan individu pemanfaat merupakan hal-hal yang menyebabkan tidak optimalnya implementasi program.

Tingkat pengembalian pinjaman pada Koperrasi Bina Masyarakat Pesisir sangat bervariasi, sebanyak 67,65 % peminjam mempunyai kategori pengembalian yang tinggi. Rata-rata pendapatan rumah tangga setelah adanya program PEMP meningkat sekitar 39,22 % dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 2.009.901,- setiap bulannya. Secara parsial, faktor yang mempengaruhi pendapatan masyarakat adalah jumlah anggota keluarga dan besarnya modal usaha.

Manfaat dari program PEMP yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat adalah adanya pinjaman dana dengan bunga yang sangat rendah untuk peningkatan modal usaha dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

6.2 Saran

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi program PEMP adalah :

1. Perlu pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program secara menyeluruh, dan yang menekankan pada output dan dampak dari program.
2. Perlu dirumuskan prioritas-prioritas program yang dapat dilaksanakan sebagai penyempurnaan dari program PEMP yang telah disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Djamaludin. 1989. "Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian" dalam *Metode Penelitian Survei*. Disunting oleh Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. LP3ES. Jakarta
- Bengen, D.G. 2002. *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya*. PKSPL IPB. Bogor.
- BPS Propinsi Bengkulu. 2003. *Bengkulu dalam Angka 2002*. Bengkulu.
- Budiharsono, Sugeng. 2004. *Analisis dan Formulasi Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Bahan Kuliah Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PS SPL) IPB. Bogor
- _____, 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- _____, 2004. *Tuntunan Penggunaan Program AHP – MAHP*.
- Dahuri, Rokhmin. 2004. *Kebijakan dan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional*. Makalah pada acara *Ocean Out Look* BEM FPIK – IPB Tanggal 16 Mei 2004. Bogor.
- Dasman, 2003. *Kebijakan dan Program Pembangunan Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu*. Makalah pada Sosialisasi PEMP Kota Bengkulu Tanggal 28 Mei 2003. Bengkulu.
- DKP RI, 2002. *Data Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) PEMP TA 2002*. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Jakarta.
- , 2003. *Data Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) PEMP TA 2003*. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Jakarta.
- , 2003. *Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Jakarta.
- , 2004. *Profil LEPP-M3*. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan RI. Jakarta.
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press Bandung.
- Khasanaturodhiyah, ST. 2002. *Kajian Partisipasi Peserta dan Kinerja Pengelolaan Program PEMP*. Tesis Program Pasca Sarjana IPB PS SPL. Bogor.

- Kusumastanto, T. 2000. *Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*. Diklat Kuliah PS SPL – IPB. Bogor.
- Latif, A. Gunawan. 1999. Peran LSM dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Pulau Barang Caddi Kota Makasar. Tesis Program Pasca Sarjana IPB PS SPL. Bogor.
- LEPP-M3 Bina Masyarakat Pesisir. 2003. *Laporan Kegiatan Program PEMP Kota Bengkulu*. Bengkulu.
- Mustamin, Andi. 2003. *Analisis Dampak Ko-Manajemen Terhadap Tingkat Kesejahteraan Nelayan di Kecamatan Pulau-pulau Sembilan Kabupaten Sinjai – Sulawesi Selatan*. Tesis Program Pasca Sarjana IPB PS SPL. Bogor.
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Cetakan Keempat. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nikijuluw, Victor PH. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Kerjasama Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional dengan PT Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- PKSPL dan LIPI. 1998. *Strategi Dasar Pembangunan Kelautan di Indonesia*. Kerjasama PKSPL IPB dan Proyek Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Puslitbang Oseanologi LIPI. Jakarta.
- Rakhmat, Jalaludin. 2002. *Metode Penelitian Komunikasi*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Rangkuti, Freddy. 2002. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Penerbit RT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Saaty, Thomas L. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*. PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Scheaffer RL, L. OTT and W. Mendenhall. 1986. *Elementary Survey Sampling*. Third Edition. Duxbury Press. Boston.
- Sugiyono, 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. C.V. Alfabeta, Bandung.
- Sutomo, 2003. *Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*. Tesis Program Pasca Sarjana IPB PS SPL. Bogor.
- Wrihatnolo, R.R dan Dwidjowijoto, R.N. 2007. *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Alex Media Komputindo, Jakarta